

KONFLIK AKTOR EKONOMI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

**(Studi Kasus Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Hotel Srabah
Semesta Resort Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Metode
Ilmu Politik

Oleh:

TRI WULANDARI

NIM 145120501111010



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

JURUSAN POLITIK PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN

INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**KONFLIK AKTOR EKONOMI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI KASUS PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
HOTEL SRABAH SEMESTA RESORT KABUPATEN TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

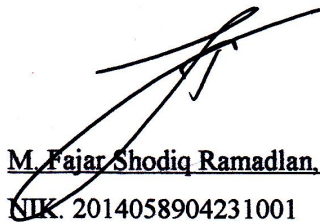
Disusun Oleh:

Tri Wulandari

145120501111010

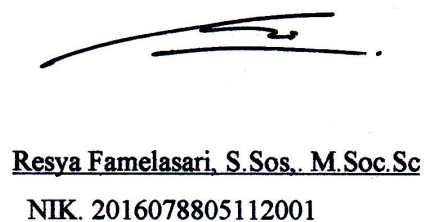
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama



M. Fajar Shodiq Ramadhan, S.IP., M.IP.
NIK. 2014058904231001

Pembimbing Pendamping



Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc
NIK. 2016078805112001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
KONFLIK AKTOR EKONOMI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI KASUS PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
HOTEL SRABAH SEMESTA RESORT KABUPATEN TULUNGAGUNG)

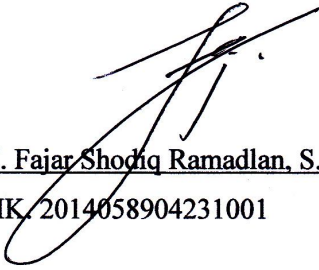
Disusun Oleh:
Tri Wulandari
145120501111010


Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik

Pada tanggal 5 juli 2018

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

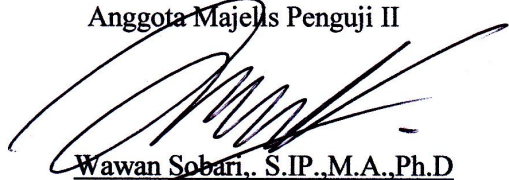

M. Fajar Shodiq Ramadan, S.IP., M.IP.
NIK. 2014058904231001


Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc
NIK. 2016078805112001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II


Dr. Abdul Aziz, S.R., M.Si


Wawan Sobari., S.IP., M.A., Ph.D
NIP. 197408012008011009

Malang, 05 Juli 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo SE., M.Si., Ak
NIP. 196908141994021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wulandari

NIM : 145120501111010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **KONFLIK AKTOR EKONOMI DAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA HOTEL SRABAH SEMESTA RESORT)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Tri Wulandari

NIM: 145120501111010

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi tentang mengamati dinamika konflik serta penyebab timbulnya konflik yang terjadi antara pengusaha hotel Srabah Semesta Resort di Kabupaten Tulungagung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara pengusaha hotel dan pemerintah kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori konflik Johan Galtung. Hasil penelitian ini adalah akar penyebab konflik yaitu minimnya pemahaman tentang regulasi khususnya menjelaskan tentang permohonan pengajuan izin mendirikan bangunan baru terhadap perenovasian sebuah bangunan yang diharuskan memiliki IMB baru sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi pihak hotel Srabah Semesta Resort melakukan perenovasian bangunan tanpa memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan Baru. Sebelumnya pihak hotel srabah sudah pernah melakukan pengajuan permohonan IMB, tetapi persyaratan tersebut masih kurang lengkap. Maka pihak DPMPTSP melakukan kontak secara lisan tetapi kontak tersebut tidak dapat dihubungi. Maka dari itu Pemerintah menerbitkan surat himbauan pertama sampai dengan ketiga, tetapi tidak adanya respon dari pihak hotel Srabah. Hal tersebut menjadikan pihak pemerintah semakin geram terhadap pihak hotel dan menjadikan konflik ini mencapai puncaknya pada penyegehan bangunan hotel. Konflik ini dalam perspektif johan galtung yaitu adanya ketidakcocokan tujuan antara pengusaha hotel dengan pemerintah kabupaten tulungagung yaitu pengusaha hotel dalam kepentingan ekonomi sedangkan pemerintah kabupaten Tulungagung adalah bentuk penegasan mentaati hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Konflik, IMB, Pengusaha, Pemerintah, Teori konflik Johan Galtung

ABSTRACT

This research is a study about observing conflict dynamics and the causes of conflict that occurred between businessman is Srabah Semesta Resort hotel's in Tulungagung District with Local Government of Tulungagung Regency related with Local Regulation Number 17 Year 2010 about the implementation of Building Permit. The purpose of this study is to find out how the dynamics of conflict that occurred between the hotel businessmen and the district government Tulungagung. This research uses qualitative method by using theory of conflict Johan Galtung. The result of this research is the root cause of the conflict that is the miss understanding about the regulation especially explaining about the application for permission to build new building on the renovation of a building which is required to have new building permit in accordance with the existing regulation. But the hotel Srabah Semesta Resort do the building renovation without having the License to Establish New Building. Previously the srabahhotel's have never made a request building permit, but the requirements are still not complete. So the DPMPTSP contacts verbally but the contact can not be contacted. Therefore the Government issued the first letter of appeal up to the third, but no response from the Srabah hotel's. This makes the government increasingly angry at the hotel and make this conflict to culminate in the sealing of hotel buildings. This conflict in perspective johan galtung that is the mismatch between destination hotel entrepreneurs with tulungagung district government that is hotel entrepreneurs in economic interests while the district government Tulungagung is a form of affirmation in accordance with applicable law.

Keywords: Conflict, Building Permit Letter, Entrepreneur, Government. Theori of conflict Johan Galtung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Antar Aktor Ekonomi dan Pemerintah Daerah (Studi kasus Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Hotel Srabah Semesta Resort Kabupaten Tulungagung)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata Satu) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Yang mana dalam skripsi ini terbagi dalam enam bab. Bab pertama berisi latar belakang dan alasan mengapa peneliti tertarik dan mengambil judul konflik antar aktor ekonomi dan pemerintah daerah. Bab kedua berisi tinjauan teori dimana sebagai alat untuk mengupas dinamika konflik yang terjadi antar aktor ekonomi dan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Bab ketiga berisi metode penelitian dimana merupakan suatu pedoman dan acuan yang digunakan dalam penelitian. Bab ke empat berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan peneliti bahas. Bab keempat berisi pembahasan mengenai dinamika konflik yang terjadi antara aktor ekonomi dan pemerintah kabupaten tulungagung serta analisis menggunakan teori konflik Johan Galtung. Sedangkan bab lima berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak menemui hambatan dan rintangan dalam setiap prosesnya. Namun berkat dukungan dan semangat dari orang tua dan teman-teman, rintangan dan hambatan tersebut bisa dilalui dengan

baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melancarkan segalanya.
2. Ayahserta Ibuku yang tidak henti-hentinya mendoakan kesuksesan, memberikan dukungan, serta semangat yang sangat memotivasi diri untuk segera mencapai kesuksesan dan bisa membanggakan orang tua.
3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, sekaligus kepada Bapak Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.SI selaku Ketua Jurusan Politik Pemerintahan Hubungan Internasional (PPHI).
4. Bapak Mohammad Fajar Shodiq Ramadlah S.IP.,M.IP., dan Ibu Resya Famelasari S.Soc.,M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk turut menuntun dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir penulis.
5. Bapak Dr. Abdul Aziz, S.R.,M.Si dan Bapak Wawan Sobari, S.IP.,M.A.,Ph.D selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan menyempurnakan skripsi penulis.
6. Bapak Broto Susetyo Selaku Ketua Bidang Perizinan Non Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, Bapak Bayu Santoso selaku pihak pengawas Lapang Hotel Srabah Semesta Resort, dan Bapak Subani Sirab selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung yang telah meluangkan waktunya dan bersedia memberikan informasi terkait skripsi penulis.

7. Seluruh dosen Ilmu Politik yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengalamannya, bagian administrasi prodi ilmu politik mas Budi dan mas Lutfi yang telah mengurus administrasi dalam proses perkuliahan dan juga pembuatan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku, Mohammad Iko Wiryadirja yang selalu memberikan motivasi, doa serta dukungannya, sahabat sharing Methi Amalia, Yuyun Priantini, Diajeng Sekar Kinanti, Yola Ayu E, Dika, dan Indra, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang selalu hadir di depan prodi Ilmu Politik untuk bersama-sama berjuang meraih gelar sarjana yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga dengan terselesaikannya penulisan tugas akhir ini bisa menjadikan informasi dan pengetahuan untuk pembaca. Penulis sadar jika dalam penulisan ini masih tidak sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T. Oleh karena itu kritik dan saran selalu dibutuhkan penulis untuk menjadi yang lebih baik.

Malang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBINGii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSIiii
PERNYATAAN.....iv
ABSTRAK..... v
ABSTRACK..... vi
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR.....xiii
DAFTAR BAGAN xiv
BAB IPENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang1
1.2. Rumusan Masalah7
1.3. Tujuan Penelitian.....7
1.4. Manfaat Penelitian.....8
BAB II Tinjauan Pustaka 9
2.1. Kerangka Teoritis..... 9
2.1.1. Teori Konflik 9
2.1.2. Teori Konflik Johan Galtung 12
2.2. Kerangka Konseptual 17
2.2.1. Konsep Aktor Ekonomi Pengusaha Hotel Srabah Semesta Resort 17
2.2.2. Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan DPRD Komisi C 18
2.2.3. Izin Mendirikan Bangunan..... 19
2.3. Penelitian Terdahulu 21
2.4. Kerangka Pemikiran 25
BAB IIIMETODE PENELITIAN..... 27
3.1. Jenis Penelitian 27
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian..... 28

3.3.	Fokus Penelitian	29
3.4.	Teknik Penentuan Informan	29
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6.	Teknik Analisa Data	31
3.7.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		35
4.1.	Kabupaten Tulungagung	35
4.2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung	36
4.3.	DPRD Kabupaten Tulungagung Komisi C	38
4.4.	Kondisi Hotel Srabah Semesta Resort	41
4.5.	Regulasi Izin Mendirikan Bangunan	41
4.6.	Regulasi Penyevelan Bangunan	44
4.7.	Sejarah Singkat Konflik Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan pada Hotel Srabah Semesta Resort	46
BAB V KONFLIK ANTARA PENGUSAHA HOTEL SRABAH DENGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG		49
5.1. Dinamika Konflik Pelanggaran IMB Pada Hotel Srabah Semesta Resort		48
5.1.	Periode Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan	48
5.2.	Penerbitan Surat Himbauan	53
5.3.	Proses Penyevelan dan Pasca-penyevelan	57
5.4.	Keterlibatan DPRD Komisi C	67
5.5.	Konflik Antara Pengusaha Hotel Srabah dengan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Johan Galtung	69
BAB VI PENUTUP		77
6.1.	Kesimpulan	77
6.2.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1. Jumlah bangunan berdasarkan kepemilikan IMB	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Tulungagung.....	36
Gambar 5.1. Dokumen Teknis Hotel Srabah dan Jambooland.....	51
Gambar 5.2. Surat Pernyataan Dokumen Administratif.....	64
Gambar 5.3. Penyevelan Bangunan Hotel.....	67



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Segitiga ABC	14
Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran	26
Bagan 3.1. Teknik Analisis Data Milles dan Huberman.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik adalah sekumpulan orang yang berbuat kerusakan atau keributan, yaitu hubungan dua belah pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atau tujuan yang tidak sejalan¹. Konflik antara pengusaha dan pemerintah terjadi jika seorang pengusaha tidak mematuhi peraturan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Seorang pengusaha yang mendirikan sebuah hotel tanpa mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan Terlebih dahulu.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku². Bangunan yang dimaksud dalam hal ini ialah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air³.

1 Muryanti, Damar Dwi Nugroho dan Rokhiman, (2013), *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, Bantul : Kreasi Wacana Kasihan Bantul, hlm. 7

² Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 13

³ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8

Mengingat mungkin saja pembangunan suatu gedung dapat mengganggu orang lain maupun membahayakan kepentingan umum, tentunya pembangunan sebuah gedung harus diatur dan diawasi oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan suatu aturan hukum yang dapat mengatur agar bangunan gedung dapat dibangun secara benar. Peraturan tentang pembangunan gedung di Indonesia salah satunya ialah Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berprinsip kemanusiaan dan berkeadilan⁴.

Peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tulungagung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang tertib baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya⁵

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

⁵ Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 Hal .23

Dalam peraturan tersebut menyangkut banyak hal diantaranya ialah pada Bab III Pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap pendirian, perubahan dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Bupati. Selanjutnya pada ayat 2 huruf c menjelaskan tentang permohonan jumlah lantai yang terdapat pada gedung yang akan dilakukan pembangunan yang berbunyi “pemohon dapat meminta keterangan rencana kota kepada instansi yang membidangi perizinan mengenai jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan”.

Peraturan Daerah tersebut juga menyangkut perihal Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terdapat pada Bab IV, dan Sanksi Administrasi pada Bab V pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 (Setiap pendirian, perubahan dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Bupati), Pasal 11 tentang pendirian bangunan harus sesuai dengan IMB, pasal 12 tentang keberlangsungan pelaksanaan pembangunan, pasal 13 (Pemegang IMB wajib mengajukan permohonan baru apabila akan melaksanakan penambahan dan/atau perubahan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB), pasal 14 tentang pembongkaran, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Terkait tentang Sanksi Administrasi lebih lengkapnya dijelaskan pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Pada Bab VI Pasal 28 yang menjelaskan bahwa pemilik atau pengguna bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2010 dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan

tertulis. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati melalui BPPT dan diberikan melalui mekanisme pertama peringatan tertulis I, apabila peringatan tertulis I dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterbitkan peringatan tidak dipatuhi maka dapat diterbitkan surat peringatan tertulis II, apabila surat peringatan tertulis II dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan surat peringatan tertulis III. Apabila surat peringatan tertulis III tidak dipatuhi maka dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b sampai dengan huruf h dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Pada Bab VI Pasal 28 dan disertai dengan tindakan penyegehan bangunan yang dilakukan oleh PPNS.

Sampai pada saat ini terdapat beberapa kasus pelanggaran hukum terkait IMB oleh masyarakat yang melakukan aktivitas pendirian bangunan tanpa memperhatikan lingkungan sosial yang ada disekitar bangunan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang sangat mendasar di wilayah Kabupaten Tulungagung yang memicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tulungagung.

Salah satu kasus pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung khususnya di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yaitu Hotel Srabah Semesta Resort. Menurut observasi awal yang dilakukan oleh penulis hotel tersebut berdiri pada tahun 1998. Pemilik hotel pada saat itu sudah mengantongi IMB. IMB pada saat itu diperuntukan bangunan hotel satu lantai, kafe dan

restoran, serta waterpark yang bernama *Jambooland*. Kemudian pada tahun 2015 dilakukan renovasi total terhadap bangunan hotel tersebut tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan IMB baru.

Pada Selasa, 29 Agustus 2017 Hotel tersebut dilakukan penyegelan oleh petugas Satpol PP bidang Penegakan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Hotel yang sedang dibangun lima lantai tersebut disegel oleh petugas yang berwenang karena belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Pembangunan tersebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

Penyegelan hotel tersebut atas mekanisme yang sudah tertera pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Pada Bab VI Pasal 28 tentang Sanksi Administratif. Sebelum dilakukan penyegelan oleh petugas Satpol PP bidang penegakan perda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP Kabupaten Tulungagung telah memberikan surat peringatan tertulis I, II, III sesuai dengan peraturan Bupati tersebut. Selanjutnya sampai pada surat peringatan tertulis III diterbitkan pihak hotel masih tetap tidak menghiraukan dan melanjutkan pembangunan. Pada akhirnya petugas penegakan perda melakukan penyegelan sesuai peraturan yang berlaku.

Pemilik hotel merasa telah memiliki IMB, karena sebelum dilakukan renovasi, di lokasi tersebut sudah berdiri bangunan hotel yang lama. Meski pemilik

merasa sudah mengurus IMB, namun itu merupakan IMB dari bangunan yang sebelumnya. Bangunan baru ini telah mengalami perubahan bentuk dan spesifikasi, maka menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 13 wajib mengajukan surat IMB baru. Apalagi bangunan baru ini nantinya akan berlantai lima dan direncanakan mengoperasikan 88 kamar dengan berbagai jenis kelas kamar, dan posisi bangunannya berada di kawasan yang kontur lahannya miring karena berada di kaki Gunung Wilis, sedangkan bangunan sebelumnya berkonsep *cottage*, yang konstruksinya jauh berbeda⁶.

Kerugian yang diperoleh terkait penyegehan bangunan hotel tersebut menyebabkan berhentinya pekerjaan konstruksi dan penyelesaian pembangunan hotel akan bertambah lama dari jadwal yang direncanakan yaitu tahun 2018. Disisi lain berdampak pada perekonomian pemilik hotel yang terhambat akibat usahanya berhenti dan tidak sesuai dengan rencana awal yang dimiliki oleh pemilik hotel yang sekarang diketahui bernama Tigor tersebut. Tetapi dalam masalah perekonomian beliau tidak terlalu dirugikan, dikarenakan usaha lain yaitu *waterpark* yang berada satu tempat dengan hotel tersebut masih tetap beroperasi sampai sekarang.

Penyegehan merupakan keputusan institusional oleh pemerintah Berdasarkan uraian kasus diatas peneliti tertarik mengetahui lebih dalam tentang konflik yang terjadi antara pengusaha hotel tersebut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang mengakibatkan penyegehan hotel. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul skripsi “Konflik Aktor Ekonomi dan Pemerintah Daerah

⁶.Redaksi, Tak Berizin Hotel Lima Lantai di Tulungagung di Segel Satpol PP, 29 Agustus 2017 dalam www.adakitanews.com/tak-berizin-hotel-lima-lantai-di-tulungagung-di-segel-satpol-pp/ (Diakses pada Minggu, 7 januari, 2018).

(Studi Kasus Pelanggaran IMB Hotel Srabah Semesta Resort Kabupaten Tulungagung)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika konflik penyegehan yang terjadi antara pengusaha hotel Srabah Semesta Resort dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pendapat tentang penyegehan dari pihak pengusaha dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menjelaskan tentang dinamika konflik yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara aktor ekonomi dan pemerintah di kabupaten Tulungagung
2. Penelitian ini menjelaskan tentang pendapat tentang penyegehan dari pihak pengusaha maupun pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam keilmuan di bidang politik terutama pada kaitannya dengan studi konflik. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya dengan tema maupun pembahasan yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi pihak yang ingin mengetahui awal mula terjadinya konflik pengusaha hotel srabah semesta resort dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung tentang pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik agar tidak mengakibatkan kejadian serupa di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

Dalam sub-bab ini peneliti menjelaskan tentang pengertian konflik, macam-macam konflik dan faktor penyebab konflik. Teori yang digunakan ialah teori konflik dari Johan Galtung dimana dalam teorinya menggunakan analisis segitiga konflik yaitu Sikap, Perilaku dan, Kontradiksi.

2.1.1. Teori Konflik

Menurut Soerjono Soekanto konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan oleh orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan⁷. Menurut Pruitt dan Rubin, “konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan. (*Perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan”. Jika memahami konflik adalah persepsi, aspirasi dan aktor yang terlibat di dalamnya. Artinya di dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), dan konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya, manusia di dunia ini pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antar perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses

⁷Soerjono Soekanto, (1992), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers Hal. 86

sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Namun dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian⁸.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Coser memberikan perhatian terhadap asal muasal konflik sosial, sama seperti pendapat Simmel bahwa ada keagresifan atau permusuhan dalam diri seseorang, dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara benci dan cinta hadir. Coser memberikan dua dasar yang melatarbelakangi terjadinya konflik:

- a. Konflik realistik: memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber perebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik.
- b. Konflik non-realistik: konflik terjadi karena didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lain

Konflik mengandung suatu pengertian tingkah laku yang luas daripada yang biasa dibayangkan orang dengan mengartikannya sebagai pertentangan yang kasar dan perang. Dasar konflik berbeda-beda. Dalam hal ini terdapat beberapa elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik, yaitu:

- a. Terdapatnya dua unit atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlihat di dalam konflik.

⁸Novri Susan, (2009), *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana., Hal. 5-6

- b. Unit-unit tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap maupun gagasan-gagasan.
- c. Terdapatnya interaksi di antara bagian-bagian yang mempunyai perbedaan-perbedaan tersebut.
- d. Perbedaan kepentingan antar kelompok, serta keinginan untuk memenangkan kemauanya sendiri.

Adapun bentuk-bentuk konflik yang akan menggambarkan persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada, antara lain:

- a. Pada taraf di dalam diri seseorang

Yaitu konflik yang menunjukkan adanya pertentangan, ketidakpastian, atau emosi-emosi dan dorongan-dorongan yang antagonis di dalam diri seseorang.

- b. Pada taraf kelompok

Konflik-konflik ditimbulkan dari konflik-konflik yang terjadi didalam diri individu dari perbedaan-perbedaan pada para anggotakelompok dalam tujuan-tujuan, nilai dan norma, motivasi mereka untuk menjadi anggota kelompok, serta minat-minat mereka.

- c. Pada taraf masyarakat

Konflik bersumber pada perbedaan diantara nilai dan normakelompok dengan nilai-nilai dan norma kelompok lain di dalam masyarakat tempat kelompok yang bersangkutan berada. Perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma serta minat.

Selain itu terdapat tipe-tipe konflik, antara lain: tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan.

- a. Tanpa konflik: menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai, tipe ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, akan tetapi ada kemungkinan atas situasi ini.
 1. Pertama: Masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah politik kekerasan.
 2. Kedua: sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.
- b. Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar biasa ditangani.
- c. Konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efeknya.
- d. Konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi⁹.

⁹*Ibid.* Hal. 92-93

2.1.2. Teori Konflik Johan Galtung¹⁰

Teori konflik yang dikemukakan oleh Galtung ialah menganalisa secara utuh dinamika konflik yang ada di masyarakat dan menawarkan berbagai macam model penyelesaian konflik. Menurut Galtung konflik dapat terjadi karena berbagai individu, kelompok dan organisasi membawa angka kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut bisa berwujud kepentingan ekonomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan tertentu berada pada lingkungan yang sama, masing-masing akan menimbulkan persepsi pada kepentingan kelompok diluarnya. Proses ini sendiri nantinya akan menimbulkan perilaku-perilaku tertentu yang menimbulkan kontadiksi dan situasi ketegangan.

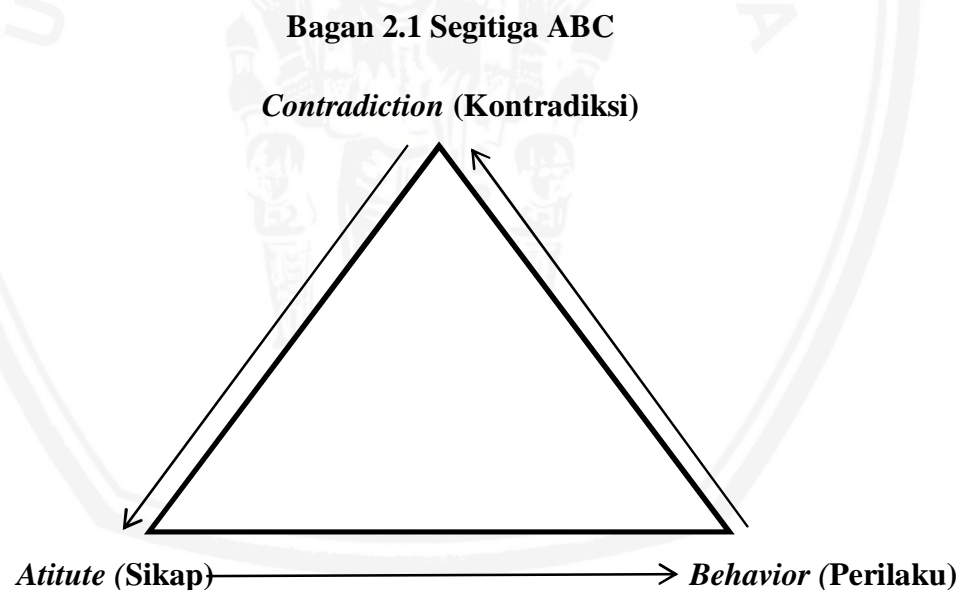
Galtung menawarkan model lain dalam membaca konflik yaitu Segitiga konflik (*The Conflict Triangle*). Menurutny ada baiknya konflik dilihat sebagai sebuah segitiga dengan tiga komponen yang terdiri dari kontradiksi, sikap dan Perilaku. Sikap adalah persepsi anggota etnis tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerja sama persaingan atau paksaan suatu gerak tangan tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai suatu proses, artinya kontradiksi dilakukan oleh unsur persepsi dan gerak etnis-etnis yang hidup dalam lingkungan sosial¹¹.

Dalam pemikiran Galtung konflik dipahami sebagai sebuah proses dinamis yang di dalamnya struktur, sikap, dan perilaku selalu berubah dan saling

¹⁰Johan Galtung.(2009),*Theorist of Conflict*.London :Transcend.

¹¹*Ibid.* Hlm.

mempengaruhi¹². Dengan munculnya konflik, sebuah formasi konflik segera terbentuk karena kepentingan masing-masing pihak saling bertikai atau karena relasi di antara mereka berubah menjadi hubungan saling menekan. Agar tujuan mereka tercapai, masing-masing pihak kemudian mengorganisasikan kelompok dan sumber daya mereka di sekitar struktur tersebut. Dari sana bisa diamati bagaimana formasi konflik muncul dan berkembang. Formasi tersebut boleh jadi memperluas dan memperdalam konflik yang terjadi sehingga tercipta lagi konflik berikutnya di antara pihak-pihak utama atau justru menyeret pihak lain ke dalam konflik. Keadaan semacam ini jelas mempersulit upaya melacak konflik yang sebenarnya.



Sumber: Novri Susan, (2009, *Pengantar Sosiologi Konflik Jakarta : Prenada Media Group*.

¹².Kemitraan Australia Indonesia. (2014) *Memahami Konflik* Modul 1.. Dalam <https://jurnalsrigunting.files.wordpress.com/2014/08/memahami-konflik.pdf> (diakses pada Jumat 13 Juli 2018)

Dalam segitiga konflik Johan Galtung disebutkan beberapa komponen diantaranya¹³:

a. *Attitude* (Sikap)

Penyebab dasar adanya sebuah konflik adalah ketidakcocokan tujuan antara suatu actor lain dalam satu konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik merupakan sebuah ikatan di dalam actor. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sikap negative akan selalu ada dalam konflik dengan pihak lain. Dengan kata lain selalu ada prasangka buruk terhadap pihak lawan. Sikap tidak bisa dimungkinkan apakah sama sebelum adanya konflik atau sesudah konflik. Ada dua macam sikap yaitu sikap positif dan sikap negative. Tidak diragukan lagi bahwa sikap dalam konflik merupakan hal yang dinamis, apabila merujuk pada eskalasi sikap dimana sikap didefinisikan sebagai proses bukan keadaan tetap.

b. *Behavior* (Perilaku)

Perilaku merupakan ekspresi atau reaksi ketika konflik terjadi baik secara verbal maupun fisik. Munculnya perilaku ketika konflik interpersonal berlangsung dengan dipengaruhi persepsi dan sikap. Perilaku konflik cenderung menimbulkan agresi dan frustrasi. Berbeda dengan sikap konflik akan muncul ketika setiap sikap-sikap konflik antar actor menunjukkan eksilasinya yang lebih dari sekedar beda pemahaman. Ketika konflik terpendam sudah muncul dalam bentuk perilaku konflik, akan muncul kecenderungan konflik yang destruktif. Situasi tersebut kemudian akan menjadi kompleks karena perubahan perilaku yang cepat, terjadi benturan nilai-nilai dan prasangka buruk antar actor sehingga sulit

¹³Johan Galtung.(2009),*Theorist of Conflict*.London :Transcend.. Hlm. 93

mengidentifikasi konflik dalam perspektif konflik struktural maupun psikostuktural. Konflik struktural merupakan konflik yang terjadi karena adanya kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber daya. Selain itu, konflik ini bersifat bebas dari sumber dan struktur kelembagaan. Sedangkan konflik psikostuktural merupakan konflik yang disebabkan oleh faktor psikologis dan kultural seperti pemikiran diri dan orang lain.

c. *Contradiction* (Kontradiksi)

Komponen konflik ini biasa disebut dengan lobi sumber daya kekuasaan. Dengan demikian komponen ini akan menimbulkan konflik vertikal. Satu hal adalah pembagian kekuasaan masalah lain dan yang lebih sulit adalah sifat kekuasaan. Untuk itu, ada beberapa anggapan dan harus mengikuti tiga garis pemikiran dalam hubungan ini. *Pertama* ada perbedaan mendasar antara kekuatan struktural, kekuatan dan sumber daya, yang tumbuh secara langsung dari perbedaan antara perspektif berorientasi pada struktur dan aktor yang berorientasi pada masyarakat. Untuk menyelubungkan kekuatan struktural, struktur harus lebih adil. Untuk menyeimbangkan sumber daya distribusi sumber daya harus lebih setara. *Kedua*, jenis kekuasaan tersebut bersifat relasional. Sebuah senjata yang dimiliki oleh seseorang dan dengan sendirinya bukan merupakan kekuatan. Harus ada seseorang yang takut akan kekuasaan untuk muncul. Aktor di atas semacam pembagian kerja vertikal memiliki kekuatan berdasarkan posisi yang dia hadapi, dibangun di dalam struktur itu sendiri. *Ketiga*, mereka yang berada di bawah memiliki sumber daya yang laten, dan stabilitas situasi didasarkan pada asumsi bahwa mereka tidak menyadari hal ini atau tidak dapat memobilisasikan

mereka. Ini adalah mobilisasi sumber daya laten dibagian bawah bahwa kunci penyelesaian konflik struktural ada, bahwa mobilisasi tentu saja merupakan aspek dasar dari setiap teori revolusi. Konsep penting disini adalah kekuatan yang berlawanan, dan kekuatan itu ada dua macam yaitu keseimbangan, dan pengabdian kekuasaan.

2.2. Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian perlu adanya konsep yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam suatu pembahasan penelitian. Konsep juga diperlukan untuk mendukung teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Diharapkan dengan adanya kerangka konseptual, maka akan didapatkannya kesinambungan antara teori dan konsep dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan konsep yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2.2.1. Aktor Ekonomi Pengusaha Hotel Srabah Semesta Resort

Pada dasarnya starting point analisis ekonomi didasari individu. Hal ini dilandasi paham utilitarianisme dan ekonomi politik yang dalam menjelaskan transaksi ekonomi semuanya dilandasi individualisme. Hal ini juga didasari pemikiran dari Adam Smith dalam karyanya "*An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*" yang ditulis pada tahun 1776. Gagasan mengenai prinsip individualisme dikemukakan dengan berpandangan bahwa motif manusia melakukan kegiatan ekonomi didasari oleh interes pribadi. Motif kepentingan individu yang didorong aliran pemikiran liberalisme akhirnya melahirkan sistem ekonomi pasar bebas yang berkembang menjadi sistem

ekonomi kapitalis. Dalam penelitian ini aktor ekonomi yang terlibat ialah pengusaha hotel Srabah Semesta Resort Kabupaten Tulungagung. Pengusaha tersebut diketahui bernama Tigor Prakasa yang lahir di Kota Kediri. Usaha hotel tersebut merupakan usaha turun temurun dari sang ayah. Pengusaha tersebut tidak hanya bergerak di bidang perhotelan, tetapi juga pariwisata seperti waterpark yang bernama jambooland yang masih dalam satu area dengan Hotel Srabah Semesta Resort.

2.2.2. Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan DPRD Komisi C

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁴.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ayat 2

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pemerintah Daerah yang terlibat dalam konflik ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagai pihak yang berwenang atau bertugas menerbitkan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Komisi C Kabupaten Tulungagung yang bertugas sebagai Pengawas jalannya pemerintahan.

2.2.3. Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku¹⁵. Sunarto juga menegaskan bahwasanya IMB merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan¹⁶.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung menegaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan syarat administratif dan persyaratan teknis yang berlaku¹⁷.

Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki IMB gedung. IMB adalah awal surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan (2008), *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 22.

¹⁶ Sunarto, (2005), *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : Amus dan Citra Pustaka, hlm. 125

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan

berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah¹⁸.

Dari penjelasan pengertian tentang IMB diatas dapat diketahui bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah kabupaten Tulungagung dimaksudkan dalam rangka, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kepada masyarakat dan bertujuan untuk kepentingan umum. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung menjelaskan pada Bab III Pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap pendirian , perubahan dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Bupati¹⁹. Kemudian dijelaskan bahwa setiap pemegang IMB wajib Pemegang IMB wajib mengajukan permohonan baru apabila akan melaksanakan penambahan dan/atau perubahan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB²⁰.

2.3. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian dengan fokus Konflik Antar Aktor Ekonomi dan Pemerintah (Studi Kasus Penyevelan Hotel Srabah Semesta Resort Kabupaten Tulungagung), maka penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Ricky Nur Andiyanto Skripsi 2017 “**Konflik Pasca Relokasi PKL ke Pasar Baru Krian (Studi Kasus Di Pasar Krian, Kabupaten Sidoarjo).**

Universitas Brawijaya Malang.

¹⁸ Marihot Pahala, op.cit, Hlm. 63

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin mendirikan Bangunan

²⁰ *Ibid.*.

Penelitian ini secara garis besar untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi setelah pemerintah melakukan relokasi PKL ke Pasar Baru Krian Kabupaten Sidoarjo. Dari analisis yang dilakukan, perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus dinamika konflik dan dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan relokasi PKL tersebut, kemudian bagaimana resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah. Pihak yang dirugikan dalam konflik ini ialah masyarakat dan PKL yang penghasilannya menurun akibat relokasi tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah ialah rapat koordinasi, adanya pemberian modal usaha dan pembebasan biaya sewa kios selama tiga bulan.

Perbedaan penelitian Ricky dengan penelitian kali ini ialah terletak pada pengimplementasian peraturan yang baru di terbitkan yang menimbulkan kontra antara PKL dengan pemerintah yang melaksanakan tugas relokasi pasar krian tersebut dengan kurangnya pengetahuan tentang implementasi peraturan daerah yang sudah sejak lama di terbitkan

2. Primastuti Sari Anggraeni Jurnal 2017, **“Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten”** Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian ini membahas tentang Seperti apa penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten. Dan upaya pemerintah untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten.

Hasil dari analisis penelitian ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penegakan hukum administrasi dengan baik. Hal ini dikarenakan proses penegakan didasarkan pada ketertiban umum masyarakat, petugas Satuan Polisi Pamong Praja melihat bahwa letak bangunan untuk kegiatan usaha itu sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu, penegakan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur.

Selain itu, upaya pemerintah untuk penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan, dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah berupaya untuk melakukan pembinaan kepada setiap anggota yang ingin mendaftarkan usahanya dan belum memiliki IMB, sedangkan dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan atau sosialisasi, serta persuatif, monitoring dan pengawasan secara terpadu dengan SKPD dan Penindakan Tegas.

Perbedaan dengan penelitian ini ialah terdapat pada fokus penelitian yaitu tentang hukum atau lebih kepada efektivitas penegakan hukum yang berlaku dengan pelanggaran hukum peraturan daerah yang menimbulkan konflik.

3. Nur Farichah Jutnal 2016 “**Konflik Antaraktor Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik**” Universitas Airlangga

Penelitian ini mengungkap penyebab konflik yang terjadi di balik pembebasan lahan, transformasi yang terjadi selama proses eskalasi, dan yang dikonflikkan dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik. Hasil penelitian ini menemukan berbagai indikasi ketidak beresan dan pelanggaran yang diorientasikan pada praktik-praktik perburuan rente para aktor pembebasan lahan. Mereka dengan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki mengupayakan segala cara untuk mengoptimalkan kepentingan, tanpa memperdulikan hak dan kepentingan masyarakat.

Perbedaan dengan penelitian kali ini ialah aktor yang terlibat yaitu masyarakat dengan aktor ekonomi yaitu pengusaha, sedangkan penelitian ini melibatkan aktor ekonomi pengusaha hotel Srabah Semesta Resort dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

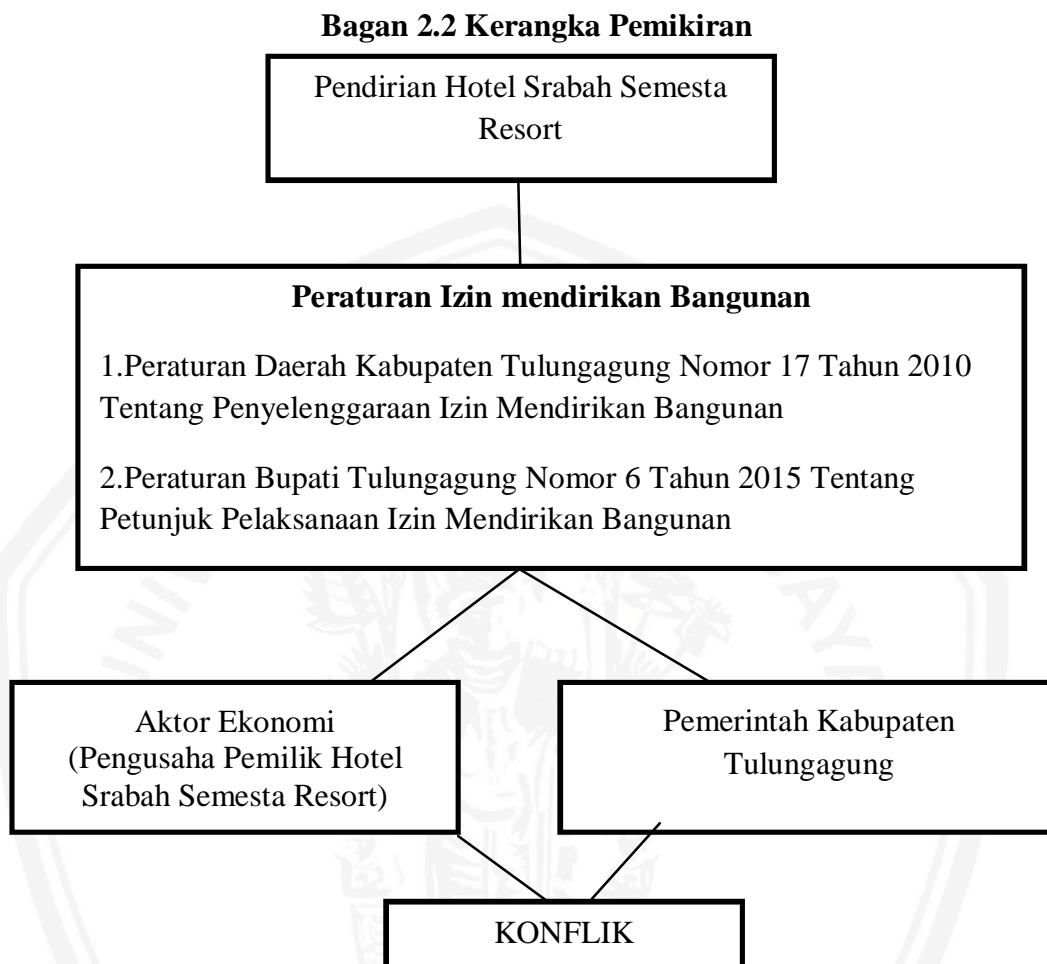
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Jenis	Judul	Deskripsi
1	Ricky Nur Andriyanto	Skripsi (2017)	Konflik Pasca Relokasi PKL ke Pasar Baru Krian (Studi Kasus Di Pasar Krian, Kabupaten Sidoarjo)	Penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi setelah pemerintah melakukan relokasi PKL ke Pasar Baru Krian Kabupaten Sidoarjo
2	Primastuti Sari Anggraeni	Jurnal (2017)	Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan	Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum

			Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten	Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten.
3	Nur Farichah	Jurnal (2016)	Konflik Antaraktor Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik	Penelitian ini mengungkap penyebab konflik yang terjadi di balik pembebasan lahan, transformasi yang terjadi selama proses eskalasi, dan yang dikonflikkan dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

2.4. Kerangka Pemikiran

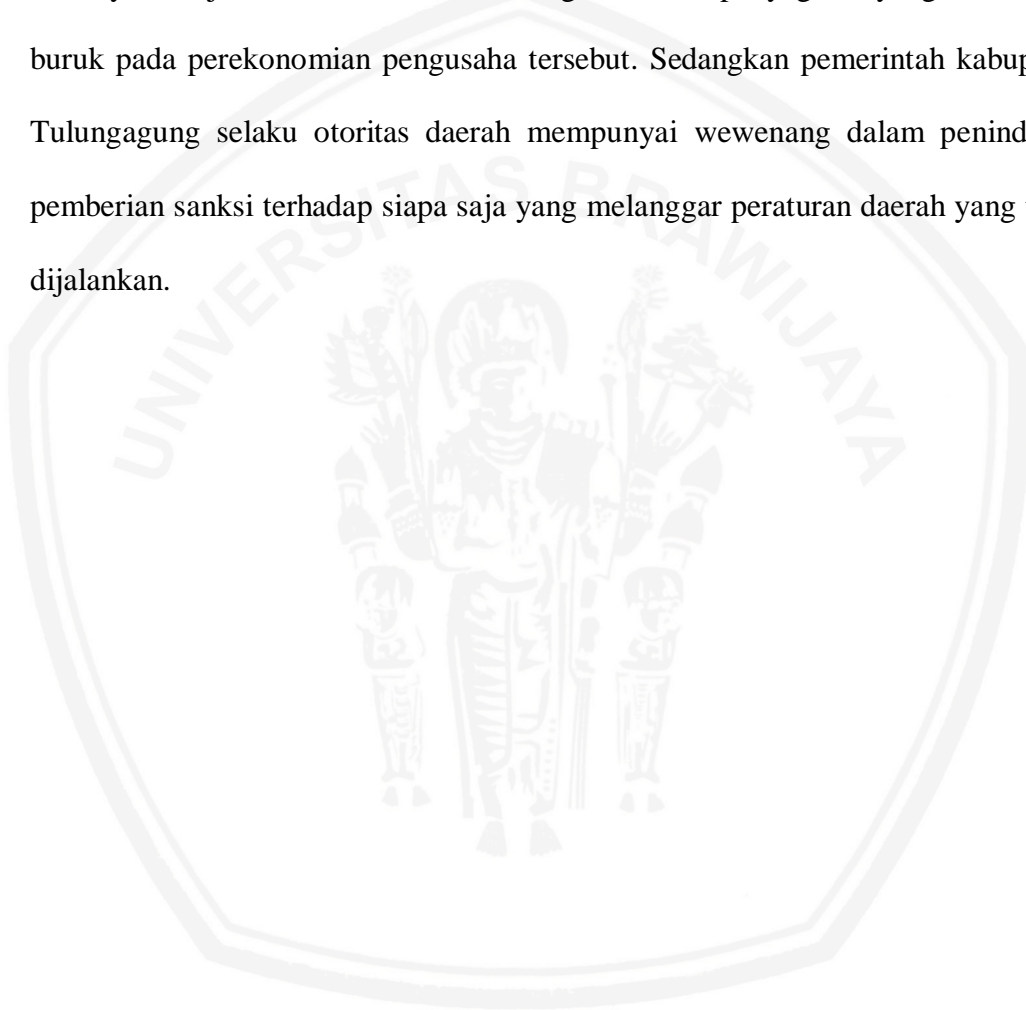


Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017.

Pelaksanaan pembangunan Hotel Srabah Semesta Resort yang berada di Kabupaten Tulungagung menimbulkan konflik antara pengusaha hotel tersebut dengan pemerintah. Hal ini dilatabelakangi oleh adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tulunggaung No 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian pada penyegehan Hotel Srabah Semesta Resort yang menimbulkan konflik kepentingan antara aktor

ekonomi yaitu pengusaha hotel Srabah Semesta Resort itu sendiri dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Bahwa kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing yaitu Pengusaha tersebut memiliki kepentingan dari segi ekonomi untuk memanfaatkan usahanya berupa hotel tersebut yang sudah ada bertahun-tahun yaitu sejak tahun 1998 dan sekarang dilakukan penyegelan yang berdampak buruk pada perekonomian pengusaha tersebut. Sedangkan pemerintah kabupaten Tulungagung selaku otoritas daerah mempunyai wewenang dalam penindakan pemberian sanksi terhadap siapa saja yang melanggar peraturan daerah yang telah dijalankan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode merupakan cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif atau teknik yang pada umumnya digunakan untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah²¹. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²². Penelitian bertujuan untuk memahami lebih dalam suatu fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar dengan lebih sistematis agar mendapatkan hasil yang kredibel, sehingga dapat dijadikan sebuah karya tulis yang memiliki nilai ilmiah. Oleh karena itu, dalam proses penelitian perlu adanya metode penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan atau fenomena yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data maupun informasi yang menunjang proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan studi di Hotel Srabah Semesta Resort Kabupaten tulungagung, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menggambarkan atau memberi informasi secara sistematis berdasarkan fakta-fakta atau keadaan empiris, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai “Bagaimana konflik yang terjadi antar pengusaha hotel tersebut dengan pemerintah”.

Tujuan dari penggunaan pendekatan kualitatif ialah untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita yang hanya

²¹ Suharto Ignatius, dkk (2008), *Perekayasaan ,Metode Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 98.

²² Sugiyono (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung:ALFABETA CV, hlm.2

dapat dipahami apabila seorang peneliti menelusurinya secara mendalam serta tidak hanya terbatas pada pandangan yang ada di permukaan²³. Melalui data informasi dan observasi peneliti diharapkan mengenai faktor-faktor apa yang melatarbelakangi konflik tersebut terjadi, diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menangani konflik baik yang terkait pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan maupun konflik yang lain.

3.2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan masih adanya pelanggaran tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tulungagung yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Seperti halnya kasus yang terjadi pada hotel Srabah Smart Resort di Kabupaten Tulungagung yang tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan pada perenovasian bangunan dari satu lantai menjadi lima lantai. Lokasi Penelitian ini adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung selaku pihak pemerintah daerah yang bertugas sebagai pengawas kebijakan tentang Izin Mendirikan Bangunan. Hotel Srabah Semesta Resort sebagai hotel yang sedang dilakukan penyegelan. DPRD Komisi C Kabupaten Tulungagung selaku pihak yang ikut turun lapangan melaksanakan penyegelan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²³J.R. Raco, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta : PT Grasindo. Hlm. 1-2.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan-batasan penelitian yang harus diperhatikan di dalam sebuah penelitian. Hal ini akan berkaitan dengan hal yang dibahas. Oleh karena itu, peneliti akan berusaha memberi batasan masalah yang akan diteliti agar tetap pada fokus penelitian dan tidak keluar dari Tujuan melakukan penelitian. Fokus penelitian juga bertujuan agar peneliti bisa lebih terarah atau sistematis dan terperinci dalam melakukan penelitian sehingga tidak menyimpang dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dinamika konflik yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara aktor ekonomi dan pemerintah di kabupaten Tulungagung.
- b. Mengetahui pendapat penyegelan dari sudut pandang pihak yang terlibat konflik yaitu pengusaha hotel Srabah Semesta Resort maupun pemerintah Kabupaten Tulungagung.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu informasi yang dipilih dengan dasar pertimbangan dan tujuan tertentu. Selain itu penentuan informan sesuai dengan kriteria kebutuhan penelitian, penetapan informan yang akan dipilih berdasarkan kompetensi yang dimiliki dalam bidang tersebut. Dengan menggunakan teknik ini peneliti bisa lebih mempelajari dan lebih mendalami permasalahan pokok yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Manajemen Hotel Srabah Semesta Resort, kemudian terdapat Informan pendukung yaitu DPRD Komisi C Kabupaten Tulungagung sebagai pihak-pihak yang sedang berkonflik.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan untuk menyelesaikan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data ialah suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada responden atau informan akan dicatat oleh penulis dalam buku catatan peneliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh validasi data dengan menggali informasi dari informan secara mendalam dan lebih detail. Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan dengan sistem semi-struktur, dimana sebuah wawancara tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara saja, tetapi informan juga memberikan ide dan gagasannya terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Penelusuran Dokumen.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dokumen yang telah diambil. Dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan identifikasi. Dokumen yang diambil peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam mengetahui bagaimana konflik yang terjadi dalam penyegelan hotel bisa terjadi. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bentuk catatan dalam bentuk kertas atau hardcopy maupun belum dicetak atau softcopy yaitu Undang-Undang, jurnal, blog, halaman web, berita, notulen dan foto serta pendapat ahli²⁴.

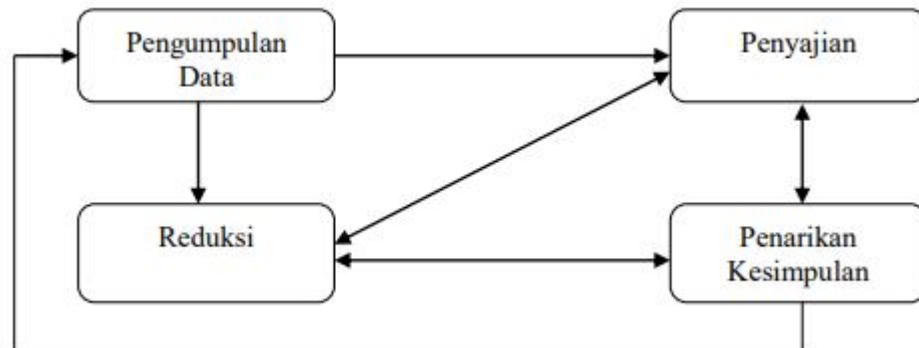
3.6. Teknik Analisa Data

Setelah data penelitian terkumpul, teknik yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis data penelitian yang berupa hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan, data yang dicatat dalam penelitian lapangan, dokumen maupun arsip resmi, gambar, foto, dan berbagai sumber lain. Dalam teknik analisa data pada penelitian ini penulis menggunakan model Miles and Huberman. Proses analisis data kualitatif di lapangan menggunakan model Milles and Huberman sebagai berikut²⁵.

²⁴Samiaji, Sarosa (2013), *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta : PT Indeks. Hlm. 61

²⁵Sugiyono (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung:ALFABETA CVHlm. 246-253

Bagan 3.1. Teknik Analisa Data Milles dan Huberman



Sumber : Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2015)

1. Data *Reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan yang berjumlah banyak perlu dicatat secara detail dan teliti. Semakin lama peneliti melakukan penelitian, semakin banyak pula data yang akan diperoleh. Oleh sebab itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data ialah berarti merangkum, memilah data-data yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi tahap selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Dalam melakukan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah didapat dan dipahami.

3. *Conclusion Drawing* {Verifikasi}

Tahapan ketiga ialah verifikasi atau bisa disebut juga dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang ataupun masih gelap dan belum jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian deskripsi tersebut menjadi lebih jelas.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah kesimpulan tersebut, tahap selanjutnya yang peneliti harus lakukan ialah menguji keabsahan data yang telah didapatkan dengan metode yang sesuai dengan jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, maka dari itu peneliti menggunakan metode Triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yang dijelaskan sebagai berikut²⁶:

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.

²⁶*Ibid.* hlm.273

2. Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data digunakan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, ataupun teknik lain dalam waktu ataupun situasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus dilakukan berulang-ulang untuk ditemukannya kepastian data.

Dalam hal ini peneliti membandingkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat. Teknik ini sangat cocok untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi antara pengusaha hotel Srabah Smart Resort Kabupaten Tulungagung dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu teknik ini juga sangat cocok untuk menganalisis konflik yang terjadi yaitu pelanggaran perda tentang Izin Mendirikan Bangunan tersebut yang mana diperlukan beberapa pihak untuk diteliti, dengan waktu, teknik dan tempat yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dalam penelitian ini.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Tulungagung

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m diatas permukaan laut (dpl).Bagian barat Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan pegunungan Wilis-Liman.Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan ialah pegunungan yang merupakan rangkaian dari pegunungan kidul. Di sebelah Barat Laut Tulungagung tepatnya di kecamatan Sendang terdapat Gunung Wilis sebagai puncak tertinggi kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah kota terdapat kali Ngrowo yang seolah membagi Tulungagung menjadi dua bagian Utara dan Selatan²⁷.

Kabupaten Tulungagung beribu Kota di Kecamatan Tulungagung, yang terletak tepat di tengah Kota Tulungagung dan terbagi dalam 19 Kecamatan.257 desa dan 14 Kelurahan²⁸. Luas wilayah di Kabupaten Tulungagung yaitu 1.055.65 km², dengan jumlah penduduk seluruhnya ialah 1.026.102 jiwa per tahun 2016²⁹.

²⁷ Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung pada tanggal 18 april 2018

²⁸ *Ibid*

²⁹ <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2017/11/13/1016/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulungagung-2016.html> diakses pada tanggal 18 april 2.018

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Tulungagung



Sumber :<http://www.eastjava.com> (Diakses pada Jumat 13 July 2018)

4.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah lembaga yang menunjang dan mendukung sumber keuangan dan perekonomian daerah , akan tetapi realitanya komponen strategis tersebut belum di kelola secara tepat dan belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembiayaan

pembangunan daerah. Guna mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembiayaan pembangunan daerah pemerintah Tulungagung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Laksana pemberian izinyang sistematis, terencana, cepat, efektif, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab. Guna mendukung perda tersebut Bupati kabupaten Tulungagung menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

➤ Manfaat Perijinan

1. Untuk Menciptakan Iklim Usaha yang sehat dan Tertib
2. Untuk mempermudah Pembinaan, pengawasan dan penertiban
3. Untuk mendapatkan legalitas usaha perindustrian, perdagangan, barang dan jasa.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat pengembangan usaha.

➤ Jenis-Jenis Perizinan

1. Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha
 1. Ijin Lokasi
 2. Ijin Gangguan
 3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB dan IMB Penerbitan)
 4. Ijin Kursus dan Ijin Bimbingan Belajar
2. Bidang Penanaman Modal
 1. Ijin Prinsip Penanaman Modal
 2. Ijin Prinsip Perluasan Modal

3. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Ijin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal

3. Bidang pelayanan Perizinan Usaha

1. Ijin Usaha Industri (IUI)
2. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
4. Ijin Penggilingan Padi (Huller) dna Penyosohan Beras
5. Ijin menggunakan Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Daerah
6. Ijin Usaha Peternakan
7. Ijin Pemasangan Reklame
8. Ijin Pemutaran/penayangan film, usaha rental dan media elektronik
9. Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
10. Tanda Daftar Gudang (TDG)
11. Tanda Dafatar Industri (TDI)
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
13. Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

4.3. DPRD Kabupaten Tulungagung Komisi C

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, yang mempunyai fungsi sebagai:

- ✓ Legilasi (Diwujudkan dalam membentuk peraturan Daerah bersama Kepala Daerah)

- ✓ Anggaran (Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD dan perhitungan APBD bersama Pemerintah Daerah)
- ✓ Pengawasan (Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah).
- Tugas dan Wewenang DPRD
 - ✓ Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati
 - ✓ Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati
 - ✓ Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Pelaksanaan APBD, dan PeraturanPerundang-undangan lainnya
 - ✓ Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan / atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
 - ✓ Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati
 - ✓ Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
 - ✓ Memberikan persetujuan atau tidak menyetujui terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah
 - ✓ Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- ✓ Memberikan persetujuan atau tidak menyetujui terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah
- ✓ Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KOMISI C (Keuangan dan Kesehatan)
 - Ketua : Drs. Subani Sirab
 - Wakil Ketua : Leman Dwi Prasetyo, S.E
 - Sekretaris : H. Fendy Yuniar S.E
 - Anggota :
 1. H. Heru Santoso, M.Pd.
 2. Suharminto ,S.H
 3. Suparlan, S.H
 4. H. M. Zaenudin, B.A.
 5. Michael Utomo, S.E.
 6. Imam Khoirudin, S.Ag.
 7. Sutomo, S.E.
 8. H. Makin

4.4. Kondisi Hotel Srabah Semesta Resort

Hotel Srabah Semesta Resort di bangun sejak tahun 1998. Selain hotel juga terdapat waterpark Jambooland yang sudah berdiri. Di tengah jambooland tersebut terdapat sebuah hotel yaitu hotel srabah semesta resort. Awal mula berdiri tahun 1998 hotel tersebut hanya berlantai satu beserta café and resto. Waterpark serta hotel tersebut adalah salah satu pariwisata yang lumayan ramai dikunjungi warga Tulungagung, karena pada saat itu hanya ada satu waterpark di Kabupaten Tulungagung yaitu Jambooland atau biasa juga disebut dengan Srabah.

Srabah tersebut terletak di bagian barat Kabupaten Tulungagung tepatnya di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dan berada di kaki Gunung Wilis. Letak tempat pariwisata yang berada di kaki gunung wilis atau di perbukitan yang mempunyai lahan tergolong miring Srabah termasuk bangunan yang besar yang sebelumnya berbentuk *cottage*.

Pada tahun 2015 sampai sekarang hotel berserta waterpark tersebut dilakukan renovasi besar-besaran. Hotel yang sebelumnya berlantai satu kini sekarang proses renovasi hingga berlantai 6. Pada saat ini bangunan tersebut masih belum selesai tetapi sudah berdiri bangunan 6 lantai.

4.5. Regulasi Izin Mendirikan Bangunan

Regulasi Izin Mendirikan Bangunan yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang menerbitkan Surat Izin Mendirikan bangunan ialah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 yaitu:

1. Permohonan IMB diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati yang harus ditandatangani pemohon diatas materai.

2. Permohonan IMB dapat dilakukan melalui pemberian Kuasa

3. Dalam permohonan IMB harus disebutkan:

- a. nama, alamat dan pekerjaan pemohon
- b. Peruntukan Bangunan
- c. Penggunaan Bahan-bahan Bangunan
- d. Lokasi bangunan yang sesuai dengan surat tanah

4. Permohonan IMB harus dilampiri dengan :

a. Dokumen Administratif yang meliputi

1. Status hakatas tanah

- a. Surat Bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh pemerintah daerah.
- b. Data kondisi / situasi tanah
- c. Pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tidak dalam status sengketa apabila pemilik tanah adalah pemilik / pemohon bangunan gedung.
- d. Perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemohon / pemilik bangunan gedung apabila pemilik tanah bukan pemilik / pemohon bangunan gedung.

2. Status Kepemilikan Bangunan gedung:

- a. Surat bukti kepemilikan gedung
- b. Data pemilik / pemohon bangunan gedung, meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor ktp, atau identitas lainnya serta fotocopy ktp atau identitas lainnya.

- b. Dokumen Rencana Teknis yang meliputi
 1. Gambar Arsitektur
 2. Gambar sistem struktur
 3. Gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrik, kebakaran, sanitasi, drainase, spesifikasi mekanikal dan elektrik)
 4. Perhitungan Struktur
 5. Perhitungan Utilitas (Untuk bangunan gedung selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret)
 6. data penyedia jasa perencanaan.
5. Dokumen Administratif dan dokumen teknis selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015.

Terdapat jumlah permohonan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 sebanyak 802 menjadi 729 di tahun 2017. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, dalam sehari rata-rata permohonan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah 7 berkas permohonan. Jenis bangunan yang diajukan pun bervariasi bergantung pada fungsi dari bangunan gedung itu sendiri. Bangunan gedung memiliki enam fungsi yaitu fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, dan fungsi ganda atau campuran. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Ijin Mendirikan Bangunan membuat jumlah Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ikut menurun dari tahun sebelumnya. Oleh sebab itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tulungagung berusaha memperbaiki pelayanan perijinan dan non perijinan dengan melakukan evaluasi tiap akhir tahun.

Berikut merupakan data mengenai jumlah bangunan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan kepemilikan IMB:

Tabel 4.1. Jumlah bangunan berdasarkan kepemilikan IMB

No	Bulan	2016	2017
1	Januari	55	60
2	Februari	100	80
3	Maret	123	67
4	April	107	67
5	Mei	66	66
6	Juni	91	64
7	Juli	47	58
8	Agustus	60	62
9	September	19	55
10	Oktober	79	93
11	November	55	57
	Total	802	729

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

4.6. Regulasi Penyegehan Bangunan

Sanksi peyegelan bangunan dapat dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah yang berlaku tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Regulasi penyegean sebuah bangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Kabupaten tulungagung dan lebih lengkapnya dijelaskan dalam peraturan Bupati Kabupaten tulungagung Nomor 6 tahun 2010 tentang Sanksi Administratif yaitu sbb:

1. Dalam hal Wajib Retribusi IMB tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Pemilik atau pengguna bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dapat dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan IMB;
- f. pencabutan IMB;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan.

3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a dikeluarkan oleh Bupati melalui BPPT dan diberikan dengan mekanisme sebagai berikut :

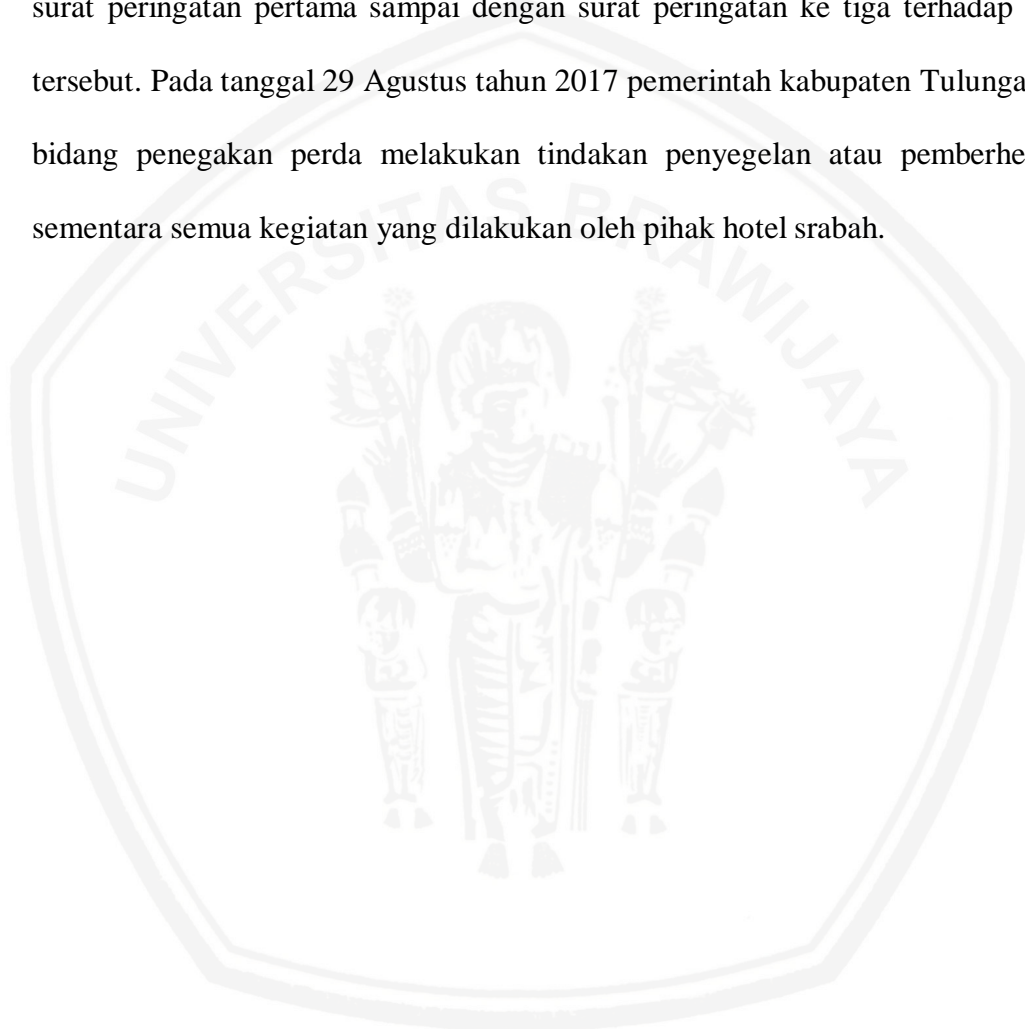
- a. Peringatan Tertulis I;
- b. Apabila peringatan tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan surat peringatan tertulis II;
- c. Apabila peringatan tertulis II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan surat peringatan tertulis III;

4. Apabila peringatan tertulis III sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c tidak dipatuhi, maka dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b sampai dengan huruf h.
5. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c sampai dengan huruf h dapat disertai dengan tindakan penyegehan bangunan yang dilakukan oleh PPNS.
6. Apabila telah dilakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagaimana dimaksud ayat 4 tetap tidak dipatuhi maka dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf i.
7. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

4.7. Sejarah Singkat Konflik Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan pada Hotel Srabah Semesta Resort

Pada prinsipnya mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Tulunggaung Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan serta lebih lanjut dijelaskan pada peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 tentang Sanksi Administratif. Setiap bangunan baru maupun perenovasian yang mengubah bentuk serta fungsi bangunan diwajibkan untuk mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan baru. perenovasian bangunan yang dilaksanakan oleh Hotel Srabah semesta resort dari lantai satu menjadi lantai enam menimbulkan konflik terhadap pemerintah. Pasalnya bangunan tersebut sudah berdiri 6 lantai meskipun belum sepenuhnya selesai tanpa mengantongi Surat Izin Mendirikan Bangunan terlebih

dahulu seperti yang telah dijelaskan pada peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010. Maka dari itu pemerintah melakukan tindakan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan pada bab VI pasal 28 yaitu menerbitkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ke tiga terhadap hotel tersebut. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2017 pemerintah kabupaten Tulungagung bidang penegakan perda melakukan tindakan penyegelan atau pemberhentian sementara semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak hotel srabah.



BAB V

KONFLIK PENGUSAHA HOTEL SRABAH SEMESTA RESORT DENGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

5.1. Dinamika Konflik Pelanggaran Imb Di Hotel Srabah Semesta Resort

Kurangnya pengetahuan tentang undang-undang atau peraturan yang sudah dijalankan oleh pemerintah menyebabkan kesalahfahaman antara masyarakat dan pemerintah. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, hotel Srabah Semesta Resort melakukan pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin mendirikan Bangunan. Hotel tersebut tidak melaksanakan permohonan izin sesuai dengan regulasi yang ada.

5.1.1. Periode Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan

Sistem regulasi Izin Mendirikan Bangunan di kabupaten Tulungagung yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 lebih lanjutnya dijelaskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2015. Pada peraturan daerah tersebut pada pasal 3 dijelaskan bahwa setiap pendirian, perubahan dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari bupati dengan mengumpulkan dokumen-dokumen wajib yang dibutuhkan untuk menerbitkan IMB. Dokumen tersebut antara lain dijelaskan pada pasal 4 yaitu Dokumen administratif dan Dokumen Rencana Teknis.

Sudah merupakan suatu kewajiban bagi siapapun baik perorangan maupun kelompok yang ingin mendirikan suatu bangunan untuk mengurus perizinan terlebih dahulu berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Fungsi utamanya adalah untuk penataan ruang kota. Agar seseorang atau kelompok yang akan mendirikan sebuah bangunan tidak serta merta membangun, karena setiap bangunan mempunyai standarisasi dengan struktur bangunan sesuai dengan rekomendasi teknik ahli dalam bangunan, dalam hal ini pihak yang menentukan ialah dinas PU. Selain standarisasi bangunan juga terdapat penataan dari fungsi bangunan tersebut apakah diperuntukkan untuk usaha, perumahan, atau kegiatan lainnya hal tersebut juga tercantum dalam aturan yang berlaku.

Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Broto selaku ketua bidang perijinan non usaha yang dilakukan wawancara oleh penulis yaitu

“pada suatu ketika kita membangun katakanlah hotel disitu secara tata ruang sebenarnya boleh apa ndak kan harus diizinkan dulu, ternyata adalah area lahan penghijauan kan tidak boleh, misalnya mau bangun pabrik, loh disini tata ruangnya adalah area pemukiman penduduk, disitu tidak bisa serta merta dia membangun pabrik. Jadi IMB fungsinya adalah untuk menata bangunan yang akan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah termasuk manfaat dan fungsinya”³⁰

Pada kasus yang dibahas pada penelitian ini tentang pelanggaran Izin mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Hotel Srabah Semesta Resort. Proses Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh hotel srabah tersebut belum sesuai dengan regulasi yang ada. Persyaratan yang diajukan oleh hotel srabah semesta resort belum lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka dari itu timbulah konflik antar pengusaha hotel srabah tersebut dengan pemerintah

³⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha Kabupaten tulungagung Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00

Kabupaten Tulungagung antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pihak yang berwenang untuk menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan dan DPRD Komisi C Kabupaten Tulungagung selaku pihak yang menjalankan fungsinya yaitu pengawasan jalannya pemerintahan dan pihak yang ikut turun lapangan melakukan penyegelan bersama dengan Satpol PP Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada Kepala Bidang Perijinan Non Usaha Bapak Broto Susetyo adalah:

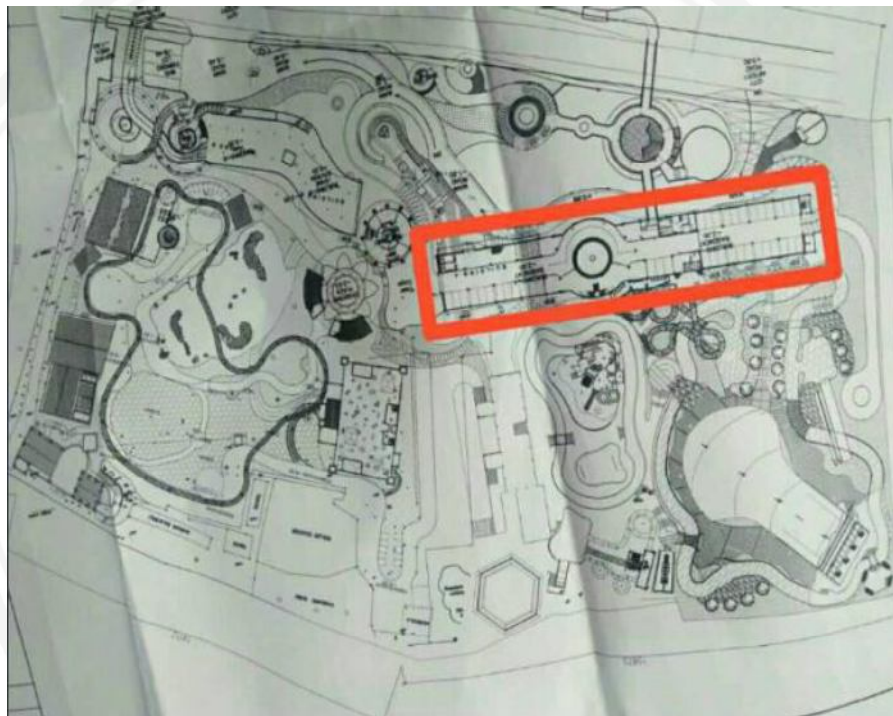
“Pada tahun 20105 itu Hotel srabah dilakukan renovasi total dan sudah mengajukan permohonan izin, tetapi secara bertahap, izin secara berkecukupan yang keluar baru izin jambooland, untuk bangunan hotelnya persyaratan kurang komplit, termasuk gambar detailnya kurang lengkap, jadi kami tidak bisa memproses surat izin, kemudian kami juga sulit menghubungi pihak pemiliknya pak sholih, trus pak sholih terkena musibah sampai dengan di penjara, kami juga sulit untuk menghubungi siapa lagi, kemudian akhirnya kita menerbitkan surat himbauan sampai tiga kali sampai surat pemberhentian sementara, nah pada saat itu baru muncul pemiliknya ternyata sudah dialihkan kepada anaknya yaitu pak tigor, nah dari situ baru bisa komunikasi, dalam komunikasi tersebut terdapat percakapan ada apa pak kok sampai seperti ini, nah dari situ kami pihak dinas mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada indikasi untuk tidak mengurus surat izin, tetapi hanya minimnya pengetahuan tentang IMB dari pihak hotel³¹.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa konflik pelanggaran IMB ini berawal dari proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Hotel Srabah Semesta Resort yang berada di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang sedang melaksanakan perenovasian total. Diketahui hotel Srabah Semesta Resort berdiri sejak tahun 1998. Bangunan

³¹Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha Kabupaten Tulungagung Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00

hotel pada saat itu sudah memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan. Awal mulanya sejak akan dilaksanakan perenovasian sebuah hotel pada tahun 2015 pihak hotel sudah mengajukan surat permohonan izin mendirikan bangunan bersamaan dengan pengajuan izin pembangunan jambooland atau waterpark yang letaknya sama dengan hotel Srabah Semesta Resort tersebut. Seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 5.1.Dokumen Teknis Hotel Srabah dan Jambooland



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten tulungaung

Pada gambar diatas yang ditandai dengan warna merah yaitu sebuah hotel dan selebihnya ialah *waterpark* bernama jambooland yang mengelilingi hotel tersebut. Pada saat itu juga pemohon mengajukan permohonan izin secara bertahap, kemudian dokumen izin yang berkecukupan dan sudah terbit yaitu hanya wilayah jambooland tidak dengan hotel. Menurut pihak yang berwenang menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dibantu dengan tim teknis yaitu dinas PU dokumen yang dibutuhkan untuk menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan kurang lengkap tidak sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

Gambar diatas adalah salah satu persyaratan teknis yang diajukan oleh pihak hotel yaitu gambar teknis. Seperti yang sudah penulis jelaskan pada Bab Gambaran Umum terkait regulasi Surat Izin Mendirikan Bangunan bahwa setiap pengajuan permohonan surat Izin Mendirikan Bangunan harus menyertakan dokumen administratif dan dokumen teknis. Dokumen teknis meliputi gambar arsitektur yang terdiri dari denah bangunan, tampak depan dan samping bangunan, potongan memanjang dan melintang bangunan, gambar sistem struktur terdiri dari gambar detail kuda-kuda, detail pondasi, detail pembesian, gambar situasi atau siteplan bangunan, gambar sistem utilitas bagi bangunan untuk kepentingan umum terdiri dari gambar rencana mekanikal, gambar rencana elektrik, gambar rencana sanitasi, gambar rencana drainase, spesifikasi mekanikal dan elektrik.

Begitu banyak dokumen teknis yang diperlukan tetapi dokumen teknis yang diajukan oleh pihak hotel srabah hanya tampak pada gambar diatas. Pada intinya ialah gambar detail teknisnya sangat kurang lengkap. Maka permohonan surat Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh pihak hotel Srabah Semesta Resort tidak dapat diproses oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten tulungagung yang dibantu oleh Dinas PU kabupaten Tulungagung.

5.1.2. Penerbitan Surat Himbauan

Seiring berjalannya waktu karena kurangnya persyaratan yang dibutuhkan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kesulitan untuk menghubungi pihak hotel pertama guna menghimbau secara lisan untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan melalui kontak nomor yang tertera pada surat pengajuan pertama pada tahun 2015 saat itu. Tetapi dengan alasan pribadi nomor kontak yang tercantum dalam surat permohonan tersebut tidak dapat dihubungi. Pada saat itu juga pemilik atau pemohon awal yang bernama pak solih sedang tertimpa musibah diluar dari kasus hotel Srabah Semesta Resort yang berada di kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tersebut.

Pada akhirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung menghimbau pihak hotel Srabah Semesta Resort secara tertulis dengan menerbitkan Surat Himbuan pertama pada awal bulan Februari 2017 kepada alamat yang tertera pada surat permohonan awal yaitu di jalan Medang Kamulan Nomor 33, Balowerti Kota Kediri. Sedangkan Hotel Srabah Semesta Resort tersebut beralamat di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Surat Himbauan pertama tersebut lebih mengarah pada himbauan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung terhadap pihak Hotel Srabah Semesta Resort untuk segera mengkonfirmasi perihal kelanjutan surat pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan. Dimana pada kenyataannya Hotel tersebut sudah berdiri sebuah

bangunan berlantai lima tanpa menunggu penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu. Surat tersebut lebih mengarah pada Himbauan, bukan pada peringatan, karena kalau surat peringatan itu diperuntukkan untuk yang tidak mengajukan permohonan sama sekali dan sesuatu hal yang sudah berizin tetapi melanggar dari izinnya. Sedangkan himbauan diperuntukkan kepada yang sudah melakukan permohonan dengan dokumen yang masih belum sesuai dengan regulasi. Hasil wawancara dengan Pak Broto yang dilakukan oleh peneliti:

“sebenarnya itu bukan surat peringatan lebih mengarah pada surat himbauan, lebih pada kalau dia tidak mengajukan sama sekali mungkin peringatan, kalau itu kan himbauan, jadi dia sudah melakukan permohonan izin tapi persyaratannya masih kurang lengkap. Sebenarnya mengarah pada himbauan agar mereka datang hadir bisa klarifikasi, yang pertama persyaratannya harus dilengkapi kan gitu, lah pada akhirnya himbauan-himbauan ini tidak ditindak lanjuti, akhirnya kita kan bisa menerbitkan surat pemberhentian sementara karena itu melanggar”³²

Selanjutnya, karena tidak adanya respon maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung menerbitkan Surat Himbauan kedua pada April 2017 dengan tujuan yang sama dengan Surat Himbauan pertama agar pihak hotel srabah semesta resort segera mengkonfirmasi perihal kelanjutan pengurusan surat izin mendirikan bangunan yang sebelumnya sudah pernah diajukan tersebut tetapi dengan persyaratan yang kurang lengkap. Tetapi surat tersebut sama dengan surat pertama yang tidak adanya respon dari pihak Hotel Srabah Semesta Resort. Maka pada awal bulan Juni 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung menerbitkan Surat Himbauan ke tiga terhadap Hotel Srabah Semesta Resort. Surat

³²Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha Kabupaten tulungagung Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00

himabauan ketiga tersebut sama dengan surat himbauan pertama dan kedua tidak terdapat respon dari Pihak Hotel Srabah Semesta Resort.

Sikap pengabaian terhadap surat-surat himbauan yang telah dikirim kepada pihak hotel srabah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung menyebabkan kontradiksi yang menimbulkan konflik menjadi bertambah. Seperti halnya kontradiksi merupakan akar dari munculnya sebuah konflik. Sikap pengabaian tersebut merupakan sikap negatif, dimana sikap negatif akan selalu ada dalam konflik. Sikap negatif tersebut salah merupakan salah satu sikap yang merupakan penyebab dari adanya ketidakcocokan tujuan antara pengusaha hotel dengan pemerintah kabupaten tulungagung.

Penerbitan surat himbauan tersebut mengacu pada penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Daerah No 17 tahun 2010 yaitu Peraturan Bupati No 6 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Pada Bab VI pasal 28 menjelaskan bahwa pemilik atau pengguna bangunan yang melanggar ketentuan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 17 tahun 2010 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati melalui BPPT dan diberikan melalui mekanisme pertama surat peringatan tertulis I, apabila surat peringatan tertulis I dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan surat peringatan

tertulis II, apabila surat peringatan tertulis II dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan surat peringatan tertulis III³³.

Jarak antar Surat Himbauan pertama sampai dengan ketiga terhitung bulan, sedangkan pada regulasi atau peraturan yang ada yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 jarak antara surat Himbauan pertama dengan kedua ialah 7 hari setelah diberlakukannya surat himbauan tersebut, begitu juga dengan penerbitan surat himbauan kedua dan ketiga. Alasannya ialah pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menegaskan bahwa surat 1 sampai dengan 3 tersebut lebih mengarah pada surat himbauan karena kalau surat peringatan itu diperuntukkan untuk yang tidak mengajukan permohonan sama sekali dan sesuatu hal yang sudah berizin tetapi melanggar dari izinnya. Sedangkan himbauan diperuntukkan kepada yang sudah melakukan permohonan dengan dokumen yang masih belum sesuai dengan regulasi. Maka terbitlah surat himbauan pertama, kedua dan ketiga sampai dengan pemberhentian sementara oleh Satpol PP guna penertiban dan penegakan perda. Hasil wawancara dengan Pak Broto yang dilakukan oleh peneliti:

“sebenarnya itu bukan surat peringatan lebih mengarah pada surat himbauan, lebih pada kalau dia tidak mengajukan sama sekali mungkin peringatan, kalau itu kan himbauan, jadi dia sudah melakukan permohonan izin tapi persyaratannya masih kurang lengkap. Sebenarnya mengarah pada himbauan agar mereka datang hadir bisa klarifikasi, yang pertama persyaratannya harus dilengkapi kan gitu, lah pada akhirnya himbauan-himbauan ini tidak ditindak lanjuti, akhirnya kita kan bisa menerbitkan surat pemberhentian sementara karena itu melanggar”³⁴

³³Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No 6 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan.

³⁴Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha Kabupaten tulungagung Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00

5.1.3. Proses Penyegehan dan Pasca-penyegehan

Puncaknya terjadi pada tanggal 29 Agustus 2017 dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung menerbitkan surat pemberhentian sementara semua aktivitas yang ada di Hotel Srabah Semesta Resort yang direkomendasikan kepada pihak Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang berwenang sebagai petugas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. Dari situ hotel Srabah Semesta Resort resmi “disegel” atau pemberhentian sementara oleh pemerintah daerah kabupaten Tulungagung. Setelah sehari sebelumnya dilakukan rapat bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khususnya Komisi C bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

Pada proses penyegehan atau pemberhentian sementara pihak DPRD Komisi C sangat ambisius dan ikut turun lapangan bersama dengan satpol PP kabupaten Tulungagung yang melaksanakan penyegehan. Setelah melaksanakan rapat paripurna DPRD komisi C melakukan sidak ke hotel srabah pada tanggal 28 Agustus 2018. Dalam berita online tersebut disampaikan bahwa:

“Mulai besok tanggal 29 Agustus 2017, pembangunannya harus dihentikan sementara, sampai izinnya dikeluarkan oleh Dinas Perizinan,” tandas Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, saat sidak ke lokasi pembangunan hotel bersama aparat Satpol PP Kabupaten Tulungagung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tulungagung, Senin (28/8) siang. Menurut dia, pelaksanaan penghentian sementara pembangunan hotel yang terintegrasi dengan tempat rekreasi waterboom tersebut akan dilakukan oleh aparat Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung. “Nanti disegel

dan jika tetap membandel melanjutkan pembangunan tanpa memenuhi perizinan bakal ada langkah lain dari DPRD Tulungagung,” katanya³⁵.

Perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi C tersebut merupakan reaksi ketika konflik terjadi. Seperti penjelasan perilaku dalam memahami konflik yang dijelaskan oleh Johan Galtung yaitu munculnya perilaku ketika konflik interpersonal berlangsung dengan dipengaruhi persepsi dan sikap. Seperti munculnya persepsi dari Ketua DPRD Komisi C yang berpersepsi bahwa pihak hotel tersebut mempunyai sikap arogansi. Seperti yang terdapat pada berita online disampaikan bahwa:

“Pembangunan hotel tanpa pengurusan IMB, lanjut Subani, merupakan bentuk arogansi dari pengusaha pembangun hotel. Apalagi, peringatan dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung beberapa waktu lalu tidak diindahkan dan ditindaklanjuti”³⁶.

Kemudian sikap yang dilakukan oleh DPRD Komisi C merupakan sikap yang negatif dan kurang dibenarkan, karena diketahui bahwa Dprd komisi C ikut dalam penyegelan Hotel yang seharusnya hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Satpol PP Kabupaten Tulungagung, serta dalam proses penyegelan Dprd Komisi C menegaskan dengan ancaman pembongkaran jika tetap melanggar peraturan yang sudah berlaku. Seperti dalam berita online mengatakan bahwa:

“Mulai besok (Selasa, 17/10), jika pengembang masih melakukan pengerjaan pembangunan hotel yang sudah disegel maka sanksinya harus dibongkar. Ini harus tegas dilakukan Satpol PP karena sudah melanggar perda,” tandas Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab saat rapat koordinasi pimpinan DPRD Tulungagung dan

³⁵Dprd admin, *Hentikan Sementara Pembangunan Hotel Berlantai Lima, 28 Agustus 2017*
<https://website.dprd-tulungagungkab.go.id/2017/08/28/hentikan-sementara-pembangunan-hotel-berlantai-lima/> (diakses padahari rabu tanggal 6 juni 2018)

³⁶*ibid*

Komisi C terkait pembangunan Hotel Srabah yang belum berizin tetap melaksanakan pembangunan di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin (16/10). Menurut Subani, seharusnya pihak pengembang Hotel Srabah tidak melakukan pengerjaan lanjutan ketika sudah disegel oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Apalagi mereka belum mengantongi izin pembangunan hotel”.³⁷

Pada kenyataannya berita tersebut terdapat kesalahan. Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pihak Hotel Srabah maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Kedua belah pihak mempunyai jawaban yang hampir sama yaitu pengerjaan atau aktivitas yang terjadi sebenarnya bukan di dalam hotel, melainkan di area jamboolan yang tidak terdapat masalah terkait Izin Mendirikan Bangunan. Diketahui bahwa letak hotel tersebut dikelilingi oleh area Waterpark yang bernama Jambooland tersebut. Seperti pada gambar 1 diatas.

Hasil penelitian terhadap pihak Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait berita diatas sebagai berikut:

“nggak, itu hanya persepsi, jadi gini, disini itu ada jambooland kolam renang atau hiburan anak-anak, waterboom ditengahnya ada hotel, berdiri sendiri, jamboolandnya sudah terbit, sudah memenuhi syarat, lah yang ada aktivitas itu di jamboolandnya, yang bermasalah hotelnya”³⁸.

Setelah dilakukan penyegelan atau pemberhentian sementara aktivitas konstruksi pada bangunan Hotel Srabah Semesta Resort pihak pemohon mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tetpadu Satu Pintu

³⁷ Dprd admin, *Bongkar Bangunan Hotel Pelanggar Perda*, 16 Oktober 2017 <https://website.dprd-tulungagungkab.go.id/2017/10/16/bongkar-bangunan-hotel-pelanggar-perda/> (diakses pada hari rabu tanggal 6 juni 2018)

³⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha Kabupaten tulungagung Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00

Kabupaten Tulungagung untuk melakukan klarifikasi. Setelahnya dijelaskan alasan penyeselan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu kepada pihak Hotel Srabah Semesta Resort bahwa dokumen-dokumen yang diajukan kurang lengkap.

Ternyata pemohon atau pemilik sudah dialihkan kepada anak pemilik pertama yaitu Bernama pak Tigor. Setelah itu terjadi komunikasi antara pihak Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan Pihak Hotel Srabah Semesta Resort dalam kelanjutan pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan.

Pada dasarnya pihak hotel Srabah Semesta Resort tidak ada indikasi untuk tidak mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan. Sebenarnya hanya minimnya pengetahuan tentang sistem regulasi yang ada oleh pihak pemohon surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu pihak Hotel Srabah Semesta Resort. Pihak Hotel merasa bahwa dahulunya mereka sudah memiliki sebuah hotel sebelum dilakukan perenovasian hotel memang sudah berdiri bangunan hotel tetapi hanya satu lantai.

Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemudian menjelaskan lebih detail kepada pihak Hotel Srabah Semesta Resort bahwasannya setelah dilakukan perenovasian Total dari lantai satu menjadi lantai lima maka perlunya Surat Izin Mendirikan Bangunan Baru, karena sudah tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Terlebih hotel tersebut dibangun pada lahan miring yaitu lereng Gunung Wilis dan mengajukan permohonan 7

Lantai tetapi hanya di rekomendasikan 5 lantai dengan alasan yang sesuai dengan regulasi yang ada.

Konfirmasi tersebut dijelaskan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung kepada pihak Hotel Srabah Semesta Resort bahwa pengajuan permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2015 lalu terdapat dokumen yang kurang. Akhirnya pihak pemohon mengerti dan merasa kalau memang dirinya salah dan selanjutnya melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah:

“Dia merasa bahwa dulunya dia punya hotel, dulu kan sudah punya izin, lah izinnnya yang dulu sudah tidak berlaku lagi karena sudah melakukan renovasi total kemudian pihak hotelnya menjawab “oh iya pak”. Ini sekarang mengajukan permohonan izin baru dengan persyaratan ini ini lah kemaren mencukupi gambar-gambar lah sudah cukup, selesai kita selesaikan, sekarang IMB nya sudah keluar.”³⁹

Jadi dalam kasus ini terdapat kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pengusaha hotel tersebut serta minimnya pemahaman dari pihak pengusaha terkait Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Pada kenyataannya sosialisasi tentang perda tersebut sudah dilakukan sejak awal diberlakukannya perda tersebut melalui kecamatan dengan cara memasang spanduk di setiap kecamatan, dan juga melalui kepala desa.

³⁹Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha Kabupaten tulungagung Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00

Setelah persyaratan sudah dilengkapi oleh pihak Hotel Srabah Semesta Resort maka pada Bulan Februari 2018 Surat Izin Mendirikan Bangunan Hotel Srabah Semesta Resort sudah diterbitkan. Sampai detik ini masih belum adanya masalah terkait surat Izin Mendirikan Bangunan yang sudah terbit, karena masih dalam proses pembangunan dan belum selesai. Bisa jadi terdapat masalah jika bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan surat izin yang sudah terbit.

Terkait dengan penyegehan atau pemberhentian sementara merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pelanggar peraturan daerah. Sanksi penyegehan merupakan bentuk ketegasan yang dilakukan pemerintah kepada setiap pelanggar peraturan daerah yang berlaku. Merupakan suatu hal yang lumrah karena bersifat sementara. Tidak ada jalan tengah lain kecuali sanksi penyegehan karena hal tersebut sudah tercantum dalam undang-undang yang berlaku di Kabupaten Tulungagung.

Hasil wawancara terhadap kepala bidang perijinan non usaha yang dilakukan oleh peneliti ialah:

“tidak ada jalan tengah lain, karena sudah ada aturannya, sanksi nya sudah ada, kami sudah memberi saran, kalau dia melanggar dengan alasan apapun perlu peringatan yang tegas, bahasa perijinan bahasa yang tegas, aturan regulasi nya ada dalam hal ini yaitu pemberhentian aktivitas, selama dia sudah menjalani sanksi administrasinya ya sudah. Terkait sanksi penyegehan ya kita sudah melakukan himbauan-himbauan dan kesulitan komunikasi dan sudah melakukan peringatan-peringatan tertulis. Diluar peraturan ya diperbolehkan karena bangunannya tidak berizin, karena bersifat sementara, bahasanya lek wes diurus yo dibukak eneh, selama proses permohonan belum selesai”⁴⁰

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha Kabupaten Tulungagung Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00

Pendapat lain tentang penyegehan hotel srabah saat peneliti melakukan wawancara dengan pihak dari Hotel Srabah Smart Resort mengatakan:

“Kami sudah mengurus surat perizinan sejak awal melakukan perenovasian, mana mungkin bisa merenovasi kalau kami tidak mengajukan permohonan surat izin. Tiba-tiba ada penyegehan tanpa ada surat peringatan bahwa akan ada penyegehan. Kami ya nurut saja, katanya ada dokumen yang kurang lengkap, setelah itu kami mengurus ke dinas terkait pak broto. Kami gak papa kalau mau di segel berapa tahun pun, uang ini bukan uang hutangan, semuanya uang kami sendiri, jadi gak harus bayar hutang, kami santai saja. Kemudian selanjutnya kami tetap mengurus persyaratan yang kurang sampai sekarang sudah keluar IMB nya⁴¹”

Terkait dengan minimnya pengetahuan tentan Peraturan Daerah seperti yang sudah penulis jelaskan pihak hotel Srabah Semesta Resort sudah mengetahui tentang Izin Mendirikan Bangunan Khususnya tentang perenovasian bangunan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak hotel Srabah Semesta Resort:

“Sudah tau, atasan saya itu urusan atasan saya pastinya sudah tau, kan dari awal sudah pernah membangun hotel juga”⁴²

Setelah dilakukan penyegehan oleh pihak terkait yaitu Satpol PP Kabupaten Tulungagung sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, pihak Hotel Srabah Semesta Resort mendatangi kanto DPMPTSP untuk melakukan konfirmasi dan melengkapi persyaratan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak Hotel Srabah Semesta Resort:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Pengawas Lapangan Hotel Srabah pada Tanggal 8 April 2018 Pukul 16.00

⁴² Hasil wawancara dengan Pengawas Lapangan Hotel Srabah pada Tanggal 8 April 2018 Pukul 16.00

“datang ke dinasnya pak broto apa yang kurang kita lengkapi sesuai prosedur yang ada”⁴³

Dalam kasus ini tidak ada perlawanan apapun dari pihak Hotel Srabah semesta resort. Seperti yang dinyatakan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“tidak, kita ikuti saja, kalau mau disegel ya silahkan saya dari kemaren juga Cuma diam menuruti apa yang ada, toh kita usaha dengan biaya kita sendiri, tidak harus bayar hutang, ya silahkan saja kalau mau disegel”⁴⁴

Sebelum dilakukan penyegelan tidak ada surat peringatan bahwa hotel tersebut akan disegel oleh pemerintah. Tetapi pihak hotel sudah mengetahui bahwasannya sanksi penyegelan akan dijatuhkan jika terdapat pelanggaran karena pada saat mengajukan permohonan izin awal terdapat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa sanggup menerima sanksi apabila dalam pelaksanaan bangunan melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Seperti pada gambar berikut:

⁴³Hasil wawancara dengan Pengawas Lapangan Hotel Srabah pada Tanggal 8 April 2018 Pukul 16.00

⁴⁴Hasil wawancara dengan Pengawas Lapangan Hotel Srabah pada Tanggal 8 April 2018 Pukul 16.00

Gambar 5.2. Surat Pernyataan Dokumen Administratif

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TIGER PRABHA

2. Pekerjaan : LOKATUNJIA

3. Alamat : Jl. WISAPATI KAMPUS 1A - 32
WATA 60001

Dengan kondisi bangunan sebagai berikut :

1. Berada diatas tanah : _____

2. Nama Jalan : Jl. PAKA WISAP
Desa/ Kelurahan : PULAKAN
Kecamatan : KULAN
Kabupaten : TULUNGAGUNG
Jalan Jurusan : KAMPUS 1A - 32

3. Terdiri dari : _____

4. Peruntukan Bangunan : RUMAH SAKIT

Dengan ini saya menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa dan akan senantiasa patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku dan sanggup memenuhinya sesuai dengan pelaksanaan bangunan melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pernyataan ini

6000

Sumber : Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Setelah dilakukannya pemberhentian sementara aktivitas pembangunan hotel tetap terdapat aktivitas yang dilakukan oleh pihak hotel seperti pada berita online yang menuliskan bahwa:

“Beberapa hari setelah disegel aktivitas pembangunan Hotel Srabah harusnya berhenti. Namun, aktivitas pembangunan itu ternyata masih berjalan meski tidak melibatkan banyak pekerja seperti hari sebelum dilakukan penyegelan. Beberapa pekerja juga terlihat keluar masuk di lantai tiga. Mereka kerap turun ke lantai di bawahnya melalui tangga yang terlihat dari luar. Meski pihak kontraktor membantah, terlihat pekerja terlihat tengah mondar-mandir di lantai lima. Saat melihat ada yang hendak mengambil foto dari kejauhan, mereka berusaha bersembunyi. Jika kondisi dianggap sudah aman, mereka kembali menampakkan diri”⁴⁵.

⁴⁵ <http://m.tulungagungtimes.com/baca/157810/20170831/190602/bandel-meski-di-segel-srabah-hotel-masih-lanjutkan-pekerjaan/>

Tetapi hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengkonfirmasi berita tersebut kepada pihak hotel maupun pihak Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung hal tersebut tidak dibenarkan. Aktivitas yang terjadi ialah di lingkungan jambooland. Karena lingkungan hotel dikelilingi oleh lingkungan jambooland, maka seolah-olah aktivitas tersebut terjadi di lingkungan Hotel. Jawaban atas berita tersebut dari pihak hotel maupun DPMPTSP hamper sama. Berikut jawaban dari pihak hotel ialah:

“salah, berita itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita itu tidak wawancara langsung kepada kami, karena kalau wawancara kepada kami melalui prosedur yang ada, ada suratnya juga. mereka hanya mengambil gambar dari luar dan kejauhan, jadi seakan-akan hotel tetap ada aktivitasnya padahal itu tukangnyanya yang di jambooland”⁴⁶

Dampak negatif yang terjadi akibat penyevelan hotel tersebut ialah target tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seharusnya awal tahun 2018 sudah dapat dioperasikan tetapi sampai sekarang belum selesai pembangunan. Kemudian pemutusan tenaga kerja konstruksi besar-besaran yang dilakukan oleh manajemen hotel Srabah Semesta Resort yang berdampak pada perekonomian pekerja konstruksi tersebut.

Pendapat lain tentang Penyevelan Hotel Srabah saat peneliti melakukan wawancara dengan DPRD Ketua Komisi C Kabupaten Tulungagung mengatakan

“Pembangunan hotel itu melanggar perda, belum punya IMB kok sudah berani membangun sampai enam lantai. Perdanya yang buat kami terus dilanggar ya kami marah. Sudah di peringatkan oleh DPMPTSP tapi tetap bandel, mentang-mentang dia orang kaya

⁴⁶Hasil wawancara dengan Pengawas Lapangan Hotel Srabah pada Tanggal 8 April 2018 Pukul 16.00

seenaknya, arogan, jadi kami turun lapangan langsung ikut serta melakukan penyegelan bersama pihak Satpol PP⁴⁷,”

Dari ketiga pendapat tersebut terdapat beberapa perbedaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik penyegelan Hotel Srabah tersebut. Ketidaklancaran komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya pengusaha hotel srabah ini menyebabkan kesalahfahaman antara pihak-pihak yang berkonflik. DPRD Komisi C Kabupaten Tulungagung tidak terlalu mengetahui akar dari permasalahan tersebut tetapi sudah berkoar-koar untuk melakukan penyegelan bahkan ancaman pembongkaran terhadap hotel srabah.

Gambar 5.3. Penyegelan Bangunan Hotel Srabah



Sumber: Dokumentasi Peneliti

5.2. Keterlibatan DPRD Komisi C

Tugas dan wewenang DPRD Komisi C kabupaten Tulungagung ialah dalam bidang keuangan dan kesehatan bermitra dengan yang salah satunya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Dalam konflik ini sudah terjadi komunikasi antara DPRD Komisi C dengan Dinas

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan DPRD Ketua Komisi C Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 April 2018 Pukul 08.30.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten tulungaung yang slaah satunya ialah melakukan rapat terkait pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin mendirikan Bangunan yang menghasilkan penerbitan Surat penyegelan atau Pemberhentian Sementara Pada Hotel Srabah Semesta Resort.

Telah diketahui bahwa DPRD Komisi C Kabupaten tulungagung bergerak dibidang keuangan dan Kesehatan.Keuangan tersebut terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Dalam kasus pada penelitian kali ini keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyegelan pada Hotel Srabah Semesta Resort selain diperuntukan sebagai penegasan sebuah aturan yang sudah diberlakukan, terdapat kepentingan lainnya yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jika sebuah bangunan tidak terdapat Surat Izin Mendirikan Bangunan maka bangunan tersebut tidak melakukan peraturan administrasi yang berlaku salah satunya yaitu dengan membayar pajak.Kepentingan tersebut menimbulkan konflik karena masing-masing pihak saling bertikai atau karena relasi di antara mereka berubah menjadi hubungan saling menekan.

Bangunan Hotel Srabah Semesta Resort yang akan dilaksanakan pembangunan menjadi lantai lima merupakan bangunan yang tergolong besar di daerah kabupaten Tulungagung, maka pajak yang akan dibayarkan terkait pajak bangunan tergolong besar pula. Hal tersebut dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten tulungagung yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan kemajuan Kabupaten Tulungagung.

Hal tersebut merupakan alasan keterlibatannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dengan tegas memperingatkan pihak Hotel Srabah Semesta Resort Kabupaten Tulungagung untuk memberhentikan bahkan sampai dengan ancaman pembongkaran Bangunan apabila tidak segera mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan.

5.3. Konflik Antara Pengusaha Hotel Srabah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Johan Galtung

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas dapat diketahui dinamika konflik yang terjadi antara pengusaha hotel Srabah semesta resort dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Untuk melihat secara terperinci dinamika konflik yang terjadi menggunakan Teori konflik Johan Galtung yaitu segitiga ABC yang mengandung tiga komponen yaitu *Attitude* (Sikap), *Behavior* (Perilaku), *Contradiction* (Kontradiksi). Dari ketiga aspek tersebut peneliti dapat melihat poin-poin khusus seperti halnya faktor penyebab, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, persepsi antar aktor selama konflik terjadi, perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing aktor yang terlibat konflik, dan lain sebagainya. Berikut hasil analisis menggunakan teori segitiga ABC Johan Galtung:

a. *Attitude* (Sikap)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti *Attitude* (Sikap) mendiskripsikan penyebab dasar adanya sebuah konflik adalah ketidakcocokan tujuan antara suatu aktor dalam satu konflik. Sikap negatif akan selalu ada dalam konflik dengan pihak lain, dengan kata lain selalu ada prasangka buruk terhadap pihak lawan. Ada dua macam sikap yaitu sikap positif dan sikap negatif. Dalam konflik ini

perbedaan atau ketidakcocokan tujuan antara aktor pengusaha dengan pemerintah yaitu aktor pengusaha dalam kepentingan ekonominya dimana pengusaha tersebut ingin sesegera mungkin menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan hotel tersebut guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi aktor pengusaha. Sedangkan aktor pemerintah bertujuan untuk ketegasan dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan khususnya peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam konflik ini aktor pengusaha juga menunjukkan sikap negatif nya dengan merasa bahwa mereka telah melakukan permohonan izin mendirikan bangunan diperuntukan hotel beserta dengan jambooland. Pada kenyataannya surat izin mendirikan bangunan yang terbit hanya untuk jambooland saja, tetapi pihak hotel srabah membangun bangunan jambooland beserta hotelnya. Maka dari itu diterbitkan surat himbauan pertama sampai dengan ketiga tetapi tidak adanya respon dari pihak hotel srabah semsta resort.

Pengabaian surat-surat himbauan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Surat himbauan tersebut sudah di terbitkan dan dikirim kepada pihak hotel srabah selama 3 kali. Tujuannya agar supaya pihak hotel srabah mengkonfirmasi kelanjutan pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan yang sebelumnya telah diurus tetapi belum sepenuhnya sehingga surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut belum diterbitkan. Disisi lain aktor pemerintah khususnya DPRD Komisi C Kabupaten Tulungagung menganggap bahwa aktor pengusaha

merupakan pihak yang memulai terjadinya konflik. Adapun prasangka negatif dari pihak DPRD Komisi C ialah menyebutkan pihak pengusaha sangat arogan karena telah membangun bangunan tanpa adanya surat izin mendirikan bangunan terlebih dahulu dan sudah diterbitkan surat himbauan sampai tiga kali tetapi tetap tidak merespon surat himbauan tersebut. Dari prasangka negatif tersebut menimbulkan kemarahan dari salah satu aktor yang terlibat dalam konflik, serta prasangka negatif tersebut salah satu penyebab terjadinya konflik.

b. *Behavior* (Perilaku)

Perilaku merupakan ekspresi atau reaksi ketika konflik terjadi. Munculnya perilaku dipengaruhi oleh persepsi dan sikap. Dalam konflik ini merupakan jenis konflik psiko-struktural yaitu konflik yang disebabkan oleh faktor psikologis dan kultural seperti pemikiran diri dan orang lain. Dari hasil penelitian yang telah disajikan diatas pihak hotel srabah semesta resort merasa sudah melakukan permohonan izin mendirikan bangunan menyebabkan mereka sesegera melakukan pengerjaan bangunan untuk jambooland beserta hotel sampai pada saat surat himbauan pertama terbit bangunan tersebut sudah berlantai lima tanpa adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan, karena dari permohonan izin yang dilakukan oleh hotel srabah tersebut surat izin mendirikan bangunan yang terbit hanya diperuntukan Jambooland. Perilaku yang dilakukan pihak hotel srabah tersebut menimbulkan kemarahan oleh pihak pemerintah Kabupaten tulungagung dan timbulnya konflik yang terjadi antar aktor pengusaha hotel srabah dan pemerintah kabupaten Tulungagung.

Dari sikap yang telah dilakukan oleh pihak pengusaha hotel dengan pengabaian surat himbauan yang telah diterbitkan sampai 3 kali dan persepsi atau prasangka buruk yang dilakukan oleh pihak salah satu pemerintah dalam aktor konflik ini menimbulkan perilaku yang kurang dibenarkan dan menimbulkan kontradiksi antar aktor yang terlibat dalam konflik yaitu pihak DPRD Komisi C berbicara dengan tegas dengan ancaman pembongkaran bangunan hotel srabah dengan ikut serta penyegelan yang seharusnya hanya cukup dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Satpol PP bidang Penegakan Perda.

c. *Contradiction* (Kontradiksi)

Pertentangan tajam yang muncul dalam sebuah konflik. Kontradiksi merupakan penyebab dasar dari adanya sebuah konflik. Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai suatu proses. Dari sikap dan perilaku yang bertentangan yang dilakukan oleh setiap aktor yang terlibat dalam konflik ini akan menimbulkan sebuah kontradiksi. Dimana dalam kontradiksi menjelaskan lebih terperinci mengenai dinamika terjadinya konflik antar pengusaha dan pemerintah yang terjadi di Kabupaten Tulungagung dari segi faktor utama penyebab, perbedaan tujuan, pihak yang terlibat dan lain sebagainya yang dapat dilihat dari penjelasan hasil penelitian Sikap dan perilaku diatas.

Awal mula terjadinya konflik antar aktor pengusaha dan pemerintah ini yaitu terjadi sulitnya berkomunikasi antara pengusaha dan pemerintah terkait dengan Regulasi Izin Mendirikan Bangunan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 17 Tahun 2010. Dimana aktor pengusaha merasa

sudah menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi pada kenyataannya menurut pemerintah belum menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Dari sini terjadinya pertentangan regulasi, dimana regulasi tersebut ialah Peraturan Daerah Kabupaten Tulunggung nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Daerah tersebut dijelaskan pada Bab III Pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap pendirian, perubahan dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Bupati. Selanjutnya pada ayat 2 huruf c menjelaskan tentang permohonan jumlah lantai yang terdapat pada gedung yang akan dilakukan pembangunan yang berbunyi “pemohon dapat meminta keterangan rencana kota kepada instansi yang membidangi perizinan mengenai jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan. Regulasi tersebut sudah jelas bahwasannya perubahan bentuk bangunan di wajibkannya memiliki IMB baru. Seperti halnya hotel srabah yang telah dilakukan perenovasian total dari lantai satu menjadi lantai 6.

Pihak hotel srabah mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan pada awal tahun 2015 diperuntukan hotel beserta dengan jambooland. Surat IMB yang sudah terbit pada saat itu hanya diperuntukan jambooland. Dikarenakan untuk membangun sebuah hotel dengan surat izin mendirikan bangunan diperlukan persyaratan yang sesuai dengan regulasi yaitu peraturan daerah no 17 tahun 2010 pada Bagian kedua tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pasal 4 b menjelaskan dalam permohonan IMB selain dokumen administratif juga melampirkan dokumen teknis yang meliputi gambar arsitektur, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas (mekanikan dan

elektrikal kebakaran, sanitasi, drainase, spesifikasi mekanikal dan elektrikal), perhitungan struktur, perhitungan utilitas (untuk bangunan gedung selain hunian rumah tinggal dan rumah deret), data penyedia jasa perencanaan.

Pada kenyatannya sesuai dengan data yang diperoleh peneliti pihak hotel srabah mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan tanpa adanya syarat dokumen teknis tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan surat izin mendirikan bangunan pada hotel tersebut tidak diterbitkan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah tersebut juga menyangkut perihal Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terdapat pada Bab IV, dan Sanksi Administrasi pada Bab V pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 (Setiap pendirian, perubahan dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Bupati), Pasal 11 tentang pendirian bangunan harus sesuai dengan IMB, pasal 12 tentang keberlangsungan pelaksanaan pembangunan, pasal 13 (Pemegang IMB wajib mengajukan permohonan baru apabila akan melaksanakan penambahan dan/atau perubahan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB), pasal 14 tentang pembongkaran, dapat dikenakan Sanksi administrasi.

Terkait tentang Sanksi Administrasi lebih lengkapnya dijelaskan pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Pada Bab VI Pasal 28 yang menjelaskan bahwa pemilik atau pengguna bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan

daerah Nomor 17 tahun 2010 dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati melalui BPPT dan diberikan melalui mekanisme pertama peringatan tertulis I, apabila peringatan tertulis I dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterbitkan peringatan tidak dipatuhi maka dapat diterbitkan surat peringatan tertulis II, apabila surat peringatan tertulis II dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan surat peringatan tertulis III. Apabila surat peringatan tertulis III tidak dipatuhi maka dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b sampai dengan huruf h dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Pada Bab VI Pasal 28 dan disertai dengan tindakan penyegehan bangunan yang dilakukan oleh PPNS.

Surat Himbauan pertama sampai dengan surat himbauan ketiga sudah diterbitkan dan dikirim ke alamat yang tercantum dalam pengajuan permohonan pada tahun 2015 tersebut yaitu di Kecamatan Balowerti Kota Kediri. sedangkan Hotel Srabah tersebut beralamat di Desa Pucangan, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Dari sini terdapat prosedur administratif tentang pengajuan permohonan surat Izin Mendirikan Bangunan yang kurang baik oleh pihak yang berwenang yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tulungagung. Perbedaan alamat yang tercantum menyebabkan ketidak jelasan surat himbauan tersebut sudah sampai di tangan pemilik atau tidak yang berakibat pada sikap negatif yaitu pengabaian surat himbauan pertama sampai dengan surat himbauan ketiga tersebut.

Sikap yang dilakukan oleh pihak pengusaha dalam pengabaian-pengabaian surat himbauan yang telah diterbitkan oleh pemerintah juga merupakan penyebab konflik ini terjadi serta menimbulkan persepsi negatif dari pemerintah terhadap pihak aktor pengusaha tersebut. Selanjutnya dalam sikap dan persepsi negatif tersebut menimbulkan perilaku yang negatif pula terhadap pihak lawan yang dilakukan oleh DPRD Komisi C dengan mendatangi langsung ke Hotel Srabah dan ikut serta melakukan penyegelan yang seharusnya hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Satpol PP bidang penegakan perda kabupaten Tulungagung serta berteriak-teriak disertai dengan ancaman pembongkaran terhadap bangunan hotel srabah yang pada saat itu sudah berdiri hingga lima lantai. Dalam hal ini terjadinya sikap kasar birokrat yang menimbulkan kontradiksi antara pengusaha dengan pemerintah tersebut, serta pola komunikasi yang kurang baik antara institusi pemerintah dalam menangani kasus yang terjadi pada hotel srabah tersebut. Dalam konflik ini terjadi ketidakcocokan tujuan yang juga menimbulkan kontradiksi yaitu pelaku ekonomi dan pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika konflik dan akar penyebab konflik yang terjadi antara aktor ekonomi dan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak hotel srabah semesta resort pada awal tahun 2015 sudah mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan untuk Hotel beserta dengan jambooland, namun surat Izin Mendirikan Bangunan yang terbit hanya untuk jambooland. Pada saat konflik berlangsung bangunan hotel srabah sudah sampai lantai lima tanpa memiliki surat Izin Mendirikan baru tersebut.
2. Pemerintah menerbitkan surat himbauan sampai dengan 3 kali, tetapi tidak adanya respon dari pihak hotel.
3. Kurangnya pengetahuan tentang regulasi yang ada pada konflik ini tentang Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan khususnya perenovasian atau perubahan sebuah bangunan diwajibkan memiliki IMB baru merupakan suatu hal yang menyebabkan pihak Hotel srabah semesta resort melanjutkan perenovasian tanpa memiliki izin mendirikan bangunan, dikarenakan pihak hotel srabah merasa sudah mengurus IMB dan IMB yang terbit tersebut hanya diperuntukan jambooland. Diketahui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 17 Tahun 2010 meskipun bangunan berdiri diatas satu tanah yang sama, akan tetapi IMB bangunan hotel dengan IMB *waterpark* berbeda.

4. Analisi menurut teori konflik johan galtung ketidakcocokan tujuan antara satu aktor yang menimbulkan konflik ialah pengusaha hotel srabah semesta Resort dalam kepentingan ekonomi dan pemerintah kabupaten Tulungagung dalam kepentingan penegakan dalam mentaati peraturan daerah yang sudah berlaku.

6.2. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkonflik dalam konflik Izin Mendirikan Bangunan ini sebagai berikut:

1. Kepada pihak hotel srabah semesta resort perlunya komunikasi yang lancar kepada pihak pemerintah terkait dengan perenovasian sebuah bangunan agar tidak terjadi kesalahfahaman terkait dengan regulasi yang ada.
2. Kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung perlunya meningkatkan sosialisasi tentang regulasi yang menyangkut Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan khususnya pasal-pasal yang menjelaskan tentang perenovasian sebuah bangunan dan bangunan berlantai lebih dari satu lantai.
3. Kepada pihak DPRD Kabupaten tulungagung Komisi C Perlunya meningkatkan pola komunikasi yang baik terhadap sesama Institusi Pemerintah agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muryanti dkk, 2013, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, Bantul, Kreasi Wacana Kasihan.

Soekanto, Soerjono, 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers

Susan, Novri, 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta. Kencana

Susan, Novri, 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta. Predana Media Grup

Galtung, Johan, 2009. *Theorist Of Conflict*. London. Transcend

Siahaan, Marihot, 2008. *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Sunarto. 2005. *Pajak dan Restribusi Daerah*. Yogyakarta. Amus dan Citra Pustaka

Ignatius Suhart dkk. 2008. *Perekayasaan, Metode Penelitian*. Yogyakarta. Andi

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif*. Bandung. Alfabheta

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis dan Karasteristik*. Jakarta. PT Grasindo.

Sarosa, Samiaji. 2013. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta. PT Indeks.

Jurnal

Ketut Gede Mudiarta. 2011. *Perspektif dan peran Sosiologi Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Bogor. Diakses melalui <https://media.neliti.com>. Pada hari sabtu Tanggal 8 Februari 2018.

Weebbsite

Tak berizin Hotel Lima Lantai di Tulunggaung di segel Satpol PP dalam www.adakitanews.com Diakses pada Minggu 7 Januari 2018.

Kabupaten Tulungagung dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Diakses> pada tanggal 18 april 2018

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id/2016.html> diakses pada tanggal 18 april 2018

Bongkar Bangunan Hotel Pelanggar Perda dalam <https://website.dprd-tulungagungkab.go.id> diakses pada hari rabu tanggal 6 juni 2018

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

Petaturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Mendirikian Bangunan